



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Solok Koto Baru No. 22 Sumatera Barat
Email : dppkabsolok@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
NOMOR : 524/ /DPP-2018

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2016 - 2021

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN SOLOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB dan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu dilakukan perubahan atas Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2016-2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok tentang penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 64);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
25. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Bupati Solok Nomor 48 Tahun 2016 tentang Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perikanan dan Pangan

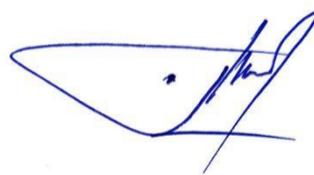
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2016–2021.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koto Baru
Pada tanggal Oktober 2018

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN,



Drh. KENEDY HAMZAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650727 199202 1 002

TEMBUSAN

disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Solok di Arosuka
2. Arsip



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN DAN PANGAN TAHUN 2016-2021



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 telah disusun.

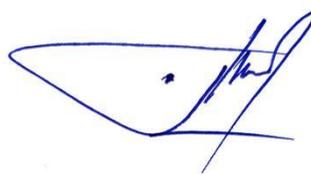
Perubahan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB serta penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk 5 (lima) tahun ke depan dan disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Tahun 2010-2015, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan isu-isu strategis yang berkembang saat ini.

Diharapkan Perubahan Renstra ini dijadikan sebagai acuan dan pegangan dalam rangka melaksanakan pembangunan perikanan dan ketahanan pangan dalam menentukan langkah kebijakan dan melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran guna pencapaian visi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.

Koto Baru, Oktober 2018

KEPALA DINAS,



DRH. KENEDY HAMZAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650727 199202 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2. Sumberdaya Dinas Perikanan dan Pangan	12
2.2.1 Sumberdaya Manusia	12
2.2.2 Asset Dinas Perikanan dan Pangan	13
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	39
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah	39
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Agenda Bupati dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	40
3.3. Telaahan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok dalam RPJMD Kabupaten Solok	43
3.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi	47
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	57
3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis	60
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	64
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	64
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	66
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	70
5.1. Rencana Program	70
5.2. Rencana Kegiatan	72
5.3. Indikator Kinerja	73
5.4. Kelompok Sasaran	75
5.5. Rencana Pendanaan Indikatif	77
6.6. Program dan Kegiatan	76
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	92
BAB VIII P E N U T U P	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Komposisi ASN Dinas Perikanan dan Pangan Berdasarkan Golongan	12
Tabel 2.	Komposisi ASN Dinas Perikanan dan Pangan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.	12
Tabel 3.	Data Aset Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2016	13
Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2010-2015.....	21
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2010-2015	22
Tabel 4.	Produksi Perikanan Budidaya dan Pertumbuhannya dari Tahun 2011 – 2015	26
Tabel 5.	Produksi Perikanan Perairan Umum dan Pertumbuhannya dari Tahun 2011 – 2015	26
Tabel 6.	Ketersediaan Energi untuk Dikonsumsi Masyarakat Kabupaten Solok Tahun 2011 – 2015	28
Tabel 7.	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Solok ...	30
Tabel 8.	Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Solok	31
Tabel 9.	Hasil Analisis Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Solok Terhadap pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok	33
Tabel 10.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Agenda Bupati dan Wakil Bupati Solok Periode 2016-2021...	42
Tabel 11.	Faktor Penghambat dan Pendorong yang Mempengaruhi Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Ditinjau dari Sasaran RPJMD	44
Tabel 12.	Keterkaitan Program Renstra Dinas Perikanan dan Pangan dan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.....	45
Tabel 13.	Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian Sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2015-2019	45
Tabel 14.	Visi, Misi, tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.....	50
Tabel 15.	Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.....	51
Tabel 16.	Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	53
Tabel 17.	Komparasi Target Capaian Sasaran Renstra terhadap Sasaran Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Solok, Renstra Propinsi dan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2016-2021	54

Tabel 18.	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	58
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok 2016-2021.....	64
Tabel 19.	Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Perikanan dan Pangan Berdasarkan Kondisi Awal Tahun 2016 dan Capaian Akhir Tahun 2021.....	74
Tabel 20.	Rencana Pendanaan Indikatif Kegiatan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.....	79
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.....	77
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan yang Mengacu pada RPJMD Tahun 2016-2021.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD daerah dan bersifat indikatif yang memiliki nilai strategis dan penting, antara lain :

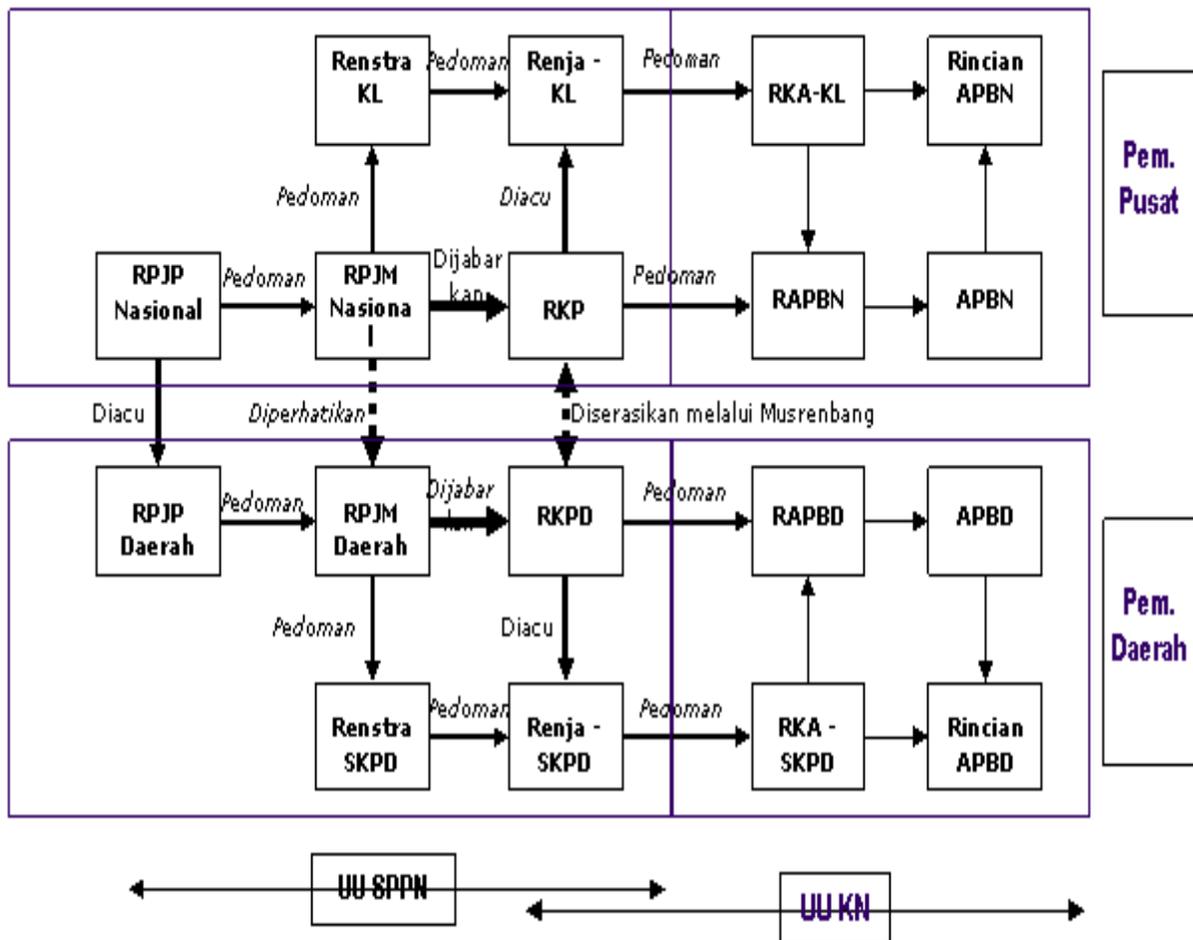
1. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang menjadi pedoman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama 5 (lima) tahun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Renstra merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
3. Rencana Strategis (Renstra) merupakan instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Rencana Strategis (Renstra) menjadi alat instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Renstra OPD merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rencana Strategis (Renstra) akan memberikan pedoman dan arah dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis OPD Tahun 2016-2021 tergambar dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang di tuangkan melalui program dan kegiatan serta mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

Gambar 1
Keterkaitan Dokumen Perencanaan



1. Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD

Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang disusun oleh setiap OPD dibawah koordinasi Barenlitbang Kabupaten Solok. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD yang sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD

2. Keterkaitan Renstra OPD dengan Renstra K/L

Keterbatasan anggaran yang tersedia di daerah, menuntut kita untuk bisa menelaah dan mengkaji program/kegiatan yang tertuang pada Renstra K/L. Hal ini bertujuan untuk mensinkronkan kegiatan yang

bisa dibiayai dengan dana APBN untuk pelaksanaan program dan kegiatan di daerah.

3. Keterkaitan Renstra OPD dengan Provinsi/Kabupaten/Kota

Sama halnya dengan Renstra K/L, penyusunan Renstra OPD juga harus disertai dengan telaah Renstra propinsi. Hal ini juga dimaksudkan untuk melihat program/kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBD Tingkat Propinsi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 Nomor 7);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
 21. Peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 64);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2021;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 25. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 26. Peraturan Bupati Solok Nomor 48 Tahun 2016 tentang Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perikanan dan Pangan

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2016-2021 ini adalah untuk memberikan arah serta sebagai pedoman dalam penyusunan rencana dan pengendalian program serta

kegiatan pembangunan di Kabupaten Solok serta dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 adalah :

1. Sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan kebijakan 5 (lima) tahun ke depan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) dengan Renstra OPD untuk mewujudkan tujuan dan sasaran OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
3. Mewujudkan visi dan misi Kabupaten Solok tahun 2016-2021.
4. Sebagai pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan OPD tahun 2016-2021.
5. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan Renstra Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021, terdiri dari 7 (tujuh) Bab yaitu;

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang, pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, keterkaitan Renstra OPD dengan Renstra K/L dan Propinsi, landasan hukum, serta maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur OPD, sumberdaya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya (sumber daya manusia dan asset), capaian-capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui renstra periode sebelumnya, capaian program yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD priode sebelumnya, serta mengulas Kekuatan, peluang, hambatan-hambatan utama dalam pencapaian visi dan misi kedepan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan OPD, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2016-2021 dan telaah Renstra OPD dalam RPJMD Telaah Kebijakan K/L/Propinsi dan telaahan RTRW dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perikanan dan Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 dan ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2016. Dinas Perikanan dan Pangan mempunyai tugas *“Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan Bidang Perikanan dan Bidang Pangan”*.

Untuk terselenggaranya tugas pokok di atas, maka Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang perikanan dan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang perikanan dan bidang pangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan dan bidang Pangan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan dan Pangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok berdasarkan Peraturan Bupati Solok No. 48 Tahun 2016 terdiri dari satu kepala, satu sekretaris, 3 bidang, 2 kasubag dan 9 seksi dengan uraian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Perikanan Budidaya
 1. Seksi Produksi Perikanan
 2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Hama dan Penyakit ikan; dan
 3. Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan.
4. Bidang Pengembangan Sumber Daya
 1. Seksi Pengembangan Kelembagaan
 2. Seksi Pengembangan Teknologi Perikanan dan Pangan; dan

3. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pengendalian Harga Produk Perikanan dan Pangan
5. Bidang Pangan
 1. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan
 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi; dan
 3. Seksi Kewaspadaan, Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Adapun tugas dan fungsi masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan anggaran meliputi penyusunan Renstra, Renja dan RKA;
2. Penyelenggaraan administrasi perkantoran yang meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat.
3. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi: pembendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan pelaporan.

2. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

1. Perumusan, perencanaan, pengembangan penyusunan konsep dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dibidang perikanan budidaya;
2. Penyusunan kebijakan produksi, kesehatan lingkungan, hama dan penyakit ikan serta peningkatan sarana dan prasarana perikanan;
3. Penyediaan benih, induk dan pakan ikan;
4. Pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
5. Pemberian bimbingan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dibidang perikanan budidaya;
6. Pemberian izin/rekomendasi di bidang perikanan budidaya;
7. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perikanan budidaya;

8. Pengendalian dan pengawasan kesehatan lingkungan, hama dan penyakit ikan;
9. Pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih, induk dan pakan ikan; dan
10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan serta analisis dibidang perikanan budidaya.

3. Bidang Pengembangan Sumberdaya

Bidang Pengembangan Sumberdaya mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan pengembangan kelembagaan, pengembangan teknologi perikanan dan pangan dan pengolahan, pemasaran dan pengendalian harga produk perikanan dan pangan bidang pengembangan sumberdaya;
2. Pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis pengolahan hasil perikanan bagi usaha produk olahan, perikanan dan pangan;
3. Pengkoordinasian penangkapan ikan pada perairan umum;
4. Pemberian bimbingan menuju kemandirian kelembagaan perikanan dan pangan;
5. Pemberian bimbingan penggunaan teknologi penangkapan ikan dan pangan yang ramah lingkungan ;
6. Pemberian izin/rekomendasi dibidang pengolahan hasil perikanan;
7. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan pangan; dan
8. Pemantauan dan evaluasi pengembangan sumberdaya perikanan dan pangan

4. Bidang Pangan

Bidang Pangan mempunyai Fungsi :

1. Perumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan, kerawanan, distribusi, cadangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketersediaan, kerawanan, distribusi, cadangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Penyiapan bahan perumusan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan dibidang produksi dan agribisnis perikanan;

4. Pengkoordinasian penyediaan infrastruktur pendukung dibidang ketersediaan, kerawanan, distribusi, cadangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas

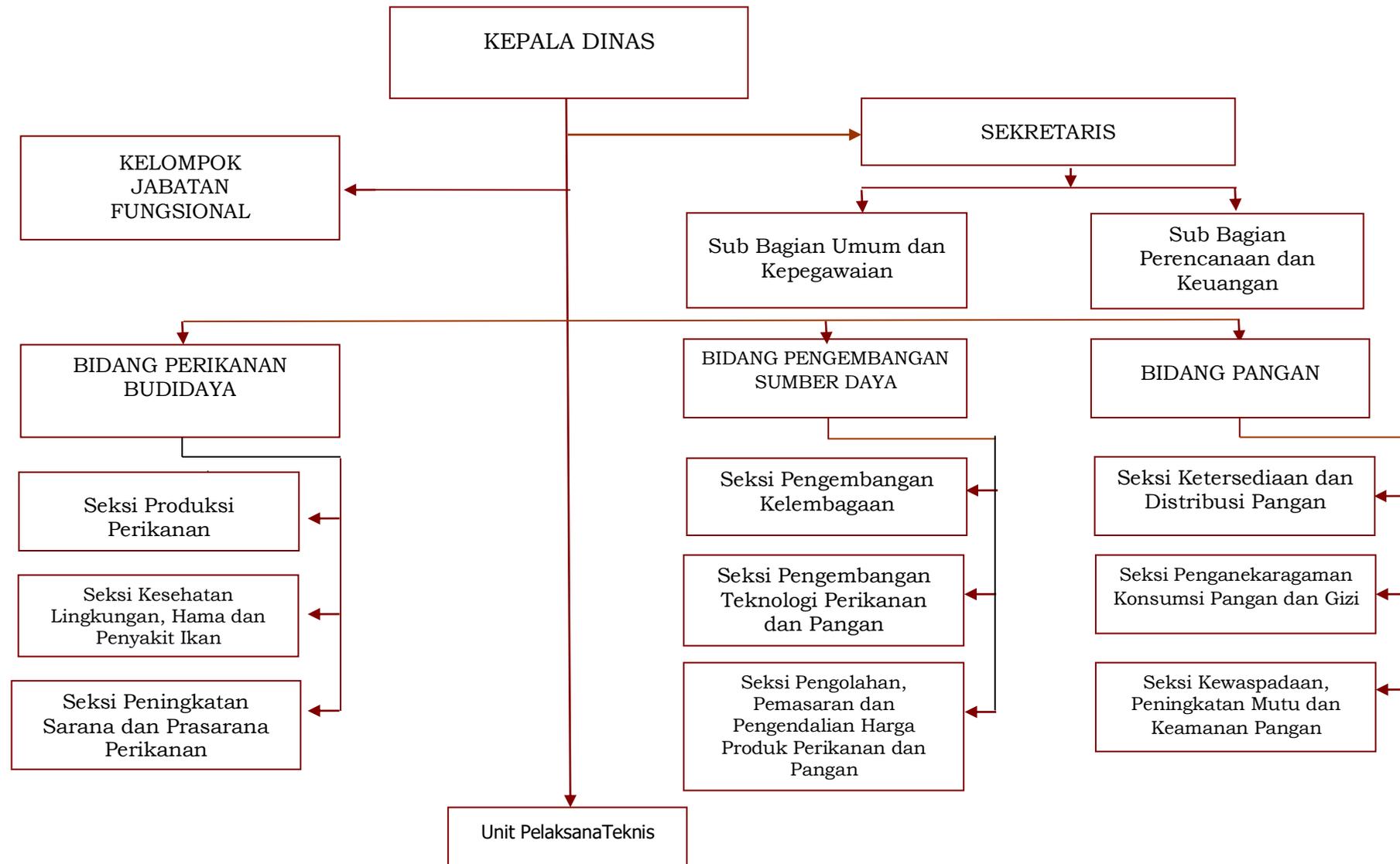
UPT Dinas Perikanan dan Pangan terdiri dari UPT Balai Benih Ikan dan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan dan Pangan pada tanggal 27 Desember 2017.

UPT Balai Benih Ikan merupakan UPT kelas A yang mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari Kepala BBI, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabnal).

UPT Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu pada dinas dibidang pembibitan ikan dan kerjasama inti plasma dengan pembudidaya ikan.

Bagan struktur organisasi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN SOLOK
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 8 TAHUN 2016**



2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumberdaya Manusia

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Perikanan dan Pangan keadaan 17 Januari 2017 sebanyak 44 orang. Adapun perincian jumlah pegawai berdasarkan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. : Komposisi ASN Dinas Perikanan dan Pangan Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	Persentase
1	Golongan IV	5 Orang	11,36 %
2	Golongan III	35 Orang	79,55%
3	Golongan II	4 Orang	9,09 %

Sedangkan komposisi pegawai ASN berdasarkan latar belakang pendidikannya adalah sebagai berikut:

1. Pasca Sarjana sebanyak 6 orang (13,6%)
2. Sarjana sebanyak 29 orang (65,91%)
3. DIII sebanyak sebanyak 2 orang (4,55 %)
4. DII sebanyak sebanyak1 orang sebanyak (2,27%)
5. SLTA sebanyak 6 orang (13,64%)

Latar belakang pendidikan ASN dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. : Komposisi ASN Dinas Perikanan dan Pangan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2 Peternakan S2 Pertanian S2 Manajemen	1 Orang 2 Orang 3 Orang
2	S1 (Dokter hewan) S1 Perikanan S1 Peternakan S1 Pertanian S1 Ekonomi S1 Kedokteran Hewan S1 Sosial S1 Statistik	1 Orang 10 Orang 4 Orang 6 Orang 4 Orang 1 Orang 2 Orang 1 Orang
3	D III Peternakan D III Farmasi	1 Orang 1 Orang
4	D II Kesehatan Hewan	1 Orang
5	SLTA	6 Orang

Disamping ASN juga terdapat tenaga harian lepas sebanyak 22 orang yang terdiri atas:

1. Pelaksana Bagian Sekretariat 5 orang
2. Pelaksana Bidang Perikanan Budidaya 4 orang
3. Pelaksana Bidang Pengembangan Sumberdaya 1 orang

4. Petugas Balai Benih Ikan (BBI) 6 orang
5. Petugas pengumpul dan pengolah data SKPG dan PSVA 1 orang
6. Petugas pengumpul dan pengolah data NBM 1 orang
7. Petugas pengumpul dan pengolah data skor PPH sebanyak 1 orang
8. Tenaga Pendamping KRPL Model 1 orang
9. Petugas Pengelola Data Keamanan Pangan Terpadu sebanyak 1 orang
10. Petugas Pemantau dan pengelola data harga pangan pokok 1 orang

2.2.2. Aset Dinas Perikanan dan Pangan

Dalam upaya mendukung tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok memiliki asset, diantaranya asset lahan/tanah, bangunan, alat mesin dan lain-lain sarana dan prasarana penunjang pelayanan bidang perikanan dan pangan di Kabupaten Solok.

Tabel 3. : Data Aset Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2016

No	Jenis Barang	Kondisi			Tahun Perolehan	Ket
		B	RR	RB		
I	Tanah					
1	Tanah Bangunan Gedung	4.670 m ²			1989	BBI Koto baru
2	Tanah Bangunan Gedung	15,54 m ²			2006	BBI Sei Janieh
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Hibah Prop				UPT Perairan Umum Singkarak
II	Peralatan dan mesin (Kib.B)					
1	Mobil	5 unit			2006, 2012, 2013, 2014, 2015	4 unit minibus dan 1 unit mobil box
2	Sepeda Motor	23 unit	1 unit	2 unit	8 unt tahun 2010, 1 unit 2011, 7 unit 2013, 9 unit 2015	total 26 unit
3	Mikroskop	1 unit			2014	
4	Gerobak	3 unit			2014	

5	PH Meter	2 unit			2013	
6	Global Positioning System(GPS)	2 unit			2013, 2015	
7	Lemari penyimpanan	1 unit			2015	
8	Tube tuster	2 unit			2014	
9	Mesin Ketik	1 unit			2014	
10	Kursi rapat	50 buah			2015	
11	Meja biro	2 buah			2015	
12	Filling Kabinet/besi	3 unit			2015	
13	Lemari arsip	6 unit			2013	
14	Kursi kerja	3 unit			2015	
15	Mesin potong rumput	1 unit			2015	
16	Lemari es	1 unit			2015	
17	AC	2 unit			2015	
18	Freezer	1 unit			2013	
19	Tabung oksigen	6 unit			2014	
20	Sound sistem	1 unit			2013	
21	Komputer lenovo	1 unit			2013	
22	Komputer	1 unit			2011	
23	Komputer Toshiba	1 unit			2014	
24	Komputer Accer	2 unit			2014	
25	Komputer Accer	1 unit			2014	
26	Komputer	1 unit			2015	
27	Laptop	1 unit			2013	
28	Laptop asus	7 unit			2015	
29	Laptop Lenovo	1 unit			2015	
30	Laptop Appel	1 unit			2015	
31	Notebook Toshiba satelit	3 unit			2015	
32	Storage Modul Disk	1 unit			2012	
33	Printer Canon	1 unit			2013	
34	Printer Epson	2 unit			2014	
35	Printer Laser Jet	1 unit			2014	
36	Printer Epson				2015	
37	Printer Epson	3 unit			2015	
38	Printer Epson L 455	1 unit			2015	
39	UPS ICA	3 buah			2013	
40	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10 buah			2013	
41	Meja Rapat	20 buah			2013	
42	Kursi Pejabat Eselon II	1 buah			2013	
43	Kursi Pejabat Eselon III	12 buah			2013	
44	Kursi Rapat	190 buah			2013	

45	Kursi Tamu Pejabat Eselon III	1 set			2013	
46	Handycamp Sony	1 buah			2013	
47	Layar Proyektor Sony	1 buah			2013	
48	Tustel Olympus	1 buah			2012	
49	Tustel Nikon	1 buah			2013	
50	Kamera	1 buah			2014	
51	Foto Tustel	1 buah			2015	
52	Foto Tustel Polaroid Panasonic	1 buah			2013	
53	Alat Komunikasi Radio SSB	2 buah			2011	
54	Inkubator	1 buah			2014	
55	Alat Laboratorium Hidrokimia (vakum filter holder)	1 buah			2015	
56	Alat Laboratorium Hidrokimia (Fortable Depth sounder)	1 buah			2015	
57	Alat Laboratorium Hidrokimia (Dissecting kit)	1 buah			2015	
58	Alat Laboratorium Hidrokimia (Petrish Normax)	20 buah			2015	
59	Refractometer	1 buah			2015	
60	Tabung Reaksi 100 ml	20 buah			2015	
61	Tabung Reaksi 200 ml	15 buah			2015	
62	Tabung Reaksi 13x100 mm	4 buah			2014	
63	Tabung Reaksi 16x100 mm	3 buah			2014	
64	Thermometer	2 buah			2015	
65	Laminar Air Flow	1 buah			2015	
66	Erlenmeyer Plastik	3 buah			2014	
67	Erlenmeyer Plastik 200 ml	1 buah			2014	
68	Petri Dish	5 buah			2015	
69	Alat Lab. Standarisasi, Kalibrasi dll (Jenco)	1 buah			2015	
70	Alat Lab. Standarisasi, Kalibrasi dll (Secci Disk)	1 buah			2015	
71	Thermometer Digital	10 buah			2011	
72	Gelas Kimia	1 buah			2014	
73	Tabung Reaksi 16x100 mm	20 buah			2015	

74	Tabung Reaksi 13x100 mm	20 buah			2015	
75	Gelas Ukur 10 ml	1 buah			2014	
76	Gelas Ukur 50 ml	1 buah			2014	
77	Gelas Ukur 100 ml	1 buah			2014	
78	Sepeda Motor Roda Tiga	1 unit			2016	
III	Gedung dan Bangunan (Kib.C)					
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 unit				BBI Sei Janieh
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 unit				BBI Sei Janieh
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 unit				BBI Sei Janieh
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 unit				BBI Sei Janieh
5	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1 unit				UPT Perairan Umum Singkarak
6	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1 unit				BBI Sei Janieh
7	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1 unit				BBI Sei Janieh
8	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1 unit				BBI Sei Janieh
9	Bangunan Gedung Tertutup Permanen	1 unit				BBI Sei Janieh
10	Bangunan Gedung Tertutup Permanen	1 unit				BBI Sei Janieh
11	Bangunan Gedung Tertutup Permanen	1 unit				BBI Sei Janieh
12	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1 unit				BBI Sei Janieh
13	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1 unit				BBI Sei Janieh
14	Bangunan Rumah sakit Hewan	1 unit				BBI Sei Janieh
15	Bangunan Oceanarium/observatorium permanen	1 unit				BBI Sei Janieh
16	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1 unit				BBI Sei Janieh
17	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	1 unit				BBI Sei Janieh
18	Gedung Pos Jaga Permanen	1 unit				BBI Sei Janieh
19	Bangunan Gedung	1 unit	1 unit			Koto Baru

	Tempat Kerja Lainnya Permanen					
20	Rumah Negara Gol II Type C Permanen	1 unit				BBI Sei Janieh
21	Rumah Negara Gol II Type D Permanen	1 unit				BBI Sei Janieh
22	Rumah Negara Gol II Type D Permanen	1 unit				BBI Sei Janieh
23	Rumah Negara Gol III Type D Permanen	1 unit	1 unit			Koto Baru
24	Rumah Negara Gol III Type D Permanen	1 unit				Koto Baru
25	Bangunan Pagar BBI	1 unit				BBI Sei Janieh
26	Rehab Saluran Pemasukan dan Pembuangan Kolam BBI	1 unit				BBI Sei Janieh
IV	Jalan ,Irigasi dan Jaringan (Kib.D)					
1	Jalan Produksi	1 ruas				BBI Sei Janieh
2	B.Pelengkap Air Bersih Lain-lain (BBI)	1 unit				BBI Sei Janieh
3	B.Pelengkap Air Bersih Lain-lain (BBI)	1 unit				BBI Sei Janieh
4	B.Pelengkap Air Bersih Lain-lain (BBI)	1 unit				BBI Sei Janieh
5	B.Pelengkap Air Bersih Lain-lain (BBI)	1 unit				BBI Sei Janieh
6	B.Pelengkap Air Bersih Lain-lain (BBI)	1 unit				BBI Sei Janieh
7	B.Pelengkap Air Bersih Lain-lain (BBI)	1 unit				BBI Sei Janieh
8	B.Pelengkap Air Bersih Lain-lain (BBI)	1 unit				BBI Sei Janieh
9	B.Pelengkap Air Bersih Lain-lain (BBI)	1 unit				BBI Sei Janieh
10	B.Pelengkap Air Bersih Lain-lain (BBI)	1 unit				BBI Sei Janieh
11	B.Pelengkap Air Bersih Lain-lain (BBI)	1 unit				BBI Sei Janieh
12	B.Pelengkap Air Bersih Lain-lain (BBI)	1 unit				BBI Sei Janieh
13	Instalasi Air bersih Lain-lain		1 unit			BBI Sei Janieh
14	Instalasi Air kotor Lain-lain	1 unit				BBI Sei Janieh dan Koto Baru
15	Intalasi Pusat Pengatur Listrik kapasitas Kecil	1 unit				BBI Sei Janieh

16	Intalasi Pusat Pengatur Listrik kapasitas Kecil	1 unit				BBI Sei Janieh
17	Intalasi Pusat Pengatur Listrik kapasitas Kecil	1 unit				BBI Sei Janieh dan Koto Baru
V	Aset Tetap lainnya (Kib.E)					
1	Buku Pengetahuan dan Tekonologi Perikanan	29 buah			2013	
2	Buku Pengetahuan dan Tekonologi Perikanan	21 buah	-	-	2016	

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalam rangka memadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota masih belum optimal.

Melihat kondisi tersebut di atas maka Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok berupaya untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan Wajib Ketahanan Pangan dan urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan.

Rencana strategis Dinas Perikanan dan Pangan pada RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 menargetkan kondisi ideal yang ingin dicapai dalam pembangunan perikanan dan ketahanan pangan untuk terjaganya ketersediaan pangan, peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan keamanan pangan segar dan peningkatan kesejahteraan keluarga pembudidaya ikan dan nelayan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok secara keseluruhan dengan mengusahakan peningkatan pendapatan per kapita penduduk disektor perikanan melalui strategi dan program-program pembangunan perikanan dan ketahanan pangan.

Tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan dan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Solok pada RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2011-2015 berdasarkan rasio sasaran/target renstra dinas dan realisasi dari indikator kinerja pelayanan secara umum sudah tercapai. Tidak tercapainya realisasi beberapa target pada tahun kelima dalam RPJMD 2011-2015 dikarenakan tidak tersedianya dukungan anggaran yang memadai untuk pencapaian kinerja tersebut.

Adapun gambaran kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan dan Kantor Ketahanan Pangan yang telah dilaksanakan selama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2011-2015 ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 :Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Tujuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Renstra Tahun					(% Rasio Capaian Renstra tahun					
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Solok Tahun 2010-2015																				
1	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (%)				-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Jumlah SOP yang telah ditetapkan				-	-	-	20	20	-	-	-	24	25	-	-	-	120,00	125,00	
3	Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai (%)				-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Jumlah laporan yang disampaikan sesuai aturan yang berlaku (laporan)				-	-	-	5	5	-	-	-	5	5	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Persentase aparatur pemerintah yang mengikuti peningkatan SDM (%)				-	-	-	4	4	-	-	-	13,75	16,47	100,00	100,00	100,00	343,75	411,75	
6	Jumlah populasi ternak :			-																
	- Sapi				32.419	35.113	36.219	36.943	37.682	32.419	35.113	36.219	37.025	38.268	100,00	100,00	100,00	100,22	101,56	
	- Kambing				16.561	18.071	18.943	19.322	19.708	16.564	18.074	18.943	19.364	16.608	100,02	100,02	100,00	100,22	84,27	
	- Unggas				445.452	533.612	716.905	727.659	738.574	445.452	533.612	716.905	830.757	3.326.846	100,00	100,00	100,00	114,17	450,44	
7	Cakupan elemen data perikanan dan peternakan Kab. Solok				-	-	-	13	13	-	-	-	13	13	-	-	-	100,00	100,00	
8	Jumlah kelompok tani peternak yang mendapat pembinaan				-	13	3	104	104	-	13	3	108	115	100,00	100,00	100,00	103,85	110,58	
9	Panjang jalan produksi yang dibangun /dipelihara.				2,70	-	-	1,00	1,00	2,70	-	-	1,60	-	100,00	-	-	160,00	-	
10	Jumlah produksi perikanan				1.519,03	1.929,60	2.474,20	3.239,00	3.440,70	1.519,03	1.951,96	2.474,20	3.238,91	3.406,20	100,00	101,16	100,00	100,00	99,00	
11	Jumlah kelompok perikanan yang mendapat pembinaan				-	-	50	50	50	-	-	50	50	50	-	-	100,00	100,00	100,00	
12	Jumlah kecamatan dengan kasus flu burung (sejenis lainnya) dan Septicainea Epizootica (SE) ≤ 5 kasus				9	11	14	14	14	9	11	14	14	14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12	Jumlah pasar khusus yang terfasilitasi sarana prasarannya				1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2010-2015																				
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pelayanan administrasi perkantoran																			
2	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase sarana dan prasarana yang diadakan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100
3	Meningkatnya disiplin pegawai				-	-	-	18	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	100	-

	Jumlah pegawai yang memiliki pakaian batik seragam				-	-	-	18	-	-	-	-	18	-	-	-	-	100	-
4	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur KKP				-	-	2	8	5	-	-	2	5	5	-	-	100	63	100
	Jumlah Aparatur Pemerintah yang mengikuti bimbingan teknis implementasi perundang-undangan				-	-	2	8	5	-	-	2	5	5	-	-	100	63	100
5	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan				5	5	5	10	10	5	5	5	10	10	100	100	100	100	100
	Jumlah Laporan, Data dan Informasi Hasil Monitoring dan evaluasi				-	-	-	5	5	-	-	-	5	5	-	-	-	100	100
	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100	100
6	Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	100	100
	Jumlah kelompok agribisnis yang dibina				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	100	100
7	Terwujudnya Ketahanan Pangan				13	163	34	140	121	12	11	34	140	121	92	7	100	100	100
	Ketersediaan Energi dan Protein per kapita	90%			90% dan 90%	339% dan 324%	350% dan 327%	343% dan 310%	335% dan 309%	266% dan 244%	376 dan 360	388 dan 363	381 dan 344	372 dan 343	295 dan 271				
	Penguatan Cadangan Pangan	60 Ton			10	10	10	20	10	-	-	-	10	10	-	-	-	50	100
	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	90%			90	90	90	90	90	83	83	83	83	83	93	93	93	93	93
	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90%			90	90	90	90	90	100	100	100	100	100	111	111	111	111	111
	Skor Pola Pangan Harapan	90			70	75	80	85	90	70,5	72,3	74,8	79,8	80,1	101	96	94	94	89
	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80%			80	80	80	80	80	96	76	90	80	90	120	95	113	100	113
	Penanganan daerah rawan pangan	60%			60	60	60	60	60	20	33	45	45	45	33	56	75	75	75
	Jumlah bantuan sosial untuk KK miskin/ KK rawan pangan				-	150	-	100	100	-	150	-	100	100	-	-	-	100	100
	Jumlah Lumbung Pangan dan sarana prasarana pendukung yang dibangun, dilengkapi dan diisi				4	2	8	5	4	4	2	8	3	2	100	100	100	100	100
	Jumlah Kelompok Pemanfaatan Pekarangan				5	5	22	31	12	5	5	22	31	38	100	100	100	100	100
	Jumlah kelompok Desa Mandiri Pangan (DMP)				1	2	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	100
	Jumlah Dokumen Ketahanan Pangan Yang tersusun				3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	100	100	100	100	100

Tabel 2.2 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2010-2015

No	Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Anggaran dan realisasi Pendanaan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Solok Tahun 2010-2015																		
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	435.119.200	452.960.000	318.227.250	287.351.656	-	400.269.596	446.772.880	303.355.227	280.319.544	-	91,99	98,63	95,33	97,55	(13)	(9)
1.	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	435.119.200	452.960.000	318.227.250	287.351.656	-	400.269.596	446.772.880	303.355.227	280.319.544	-	91,99	98,63	95,33	97,55	(13)	(9)
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	299.631.700	219.674.400	158.937.200	193.630.000	-	296.710.608	218.234.593	158.430.029	191.726.574	-	99,03	99,34	99,68	99,02	(3)	(11)
1.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana	-	299.631.700	219.674.400	158.937.200	193.630.000	-	296.710.608	218.234.593	158.430.029	191.726.574	-	99,03	99,34	99,68	99,02	(3)	(11)
III.	Program peningkatan Sumber daya aparatur	-	-	20.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	19.930.000	8.780.000	9.725.000	-	-	99,65	87,80	97,25	(25)	(23)
1.	Kegiatan peningkatan sumber daya aparatur	-	-	20.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	19.930.000	8.780.000	9.725.000	-	-	99,65	87,80	97,25	(25)	(23)
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	8.000.000	8.000.000	5.000.000	8.500.000	-	7.987.200	7.991.000	4.982.000	8.474.000	-	99,84	99,89	99,64	99,69	11	11
1.	Kegiatan Peningkatan Pengembangan	-	8.000.000	8.000.000	5.000.000	8.500.000	-	7.987.200	7.991.000	4.982.000	8.474.000	-	99,84	99,89	99,64	99,69	11	11

	Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
V.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	-	100.000.000	135.000.000	42.592.500	21.336.000	-	99.137.700	132.129.500	41.163.800	21.278.500	-	99,14	97,87	96,65	99,73	(28)	(28)
1	Kegiatan penyusunan database potensi produksi pangan	-	100.000.000	135.000.000	42.592.500	21.336.000	-	99.137.700	132.129.500	41.163.800	21.278.500	-	99,14	97,87	96,65	99,73	(28)	(28)
VI	Program pengembangan budidaya perikanan	-	-	5.524.214.950	3.173.076.590	4.020.273.280	-	2.919.832.247	4.874.029.962	2.207.687.475	3.879.616.455	-				96,50	(8)	
1	Kegiatan pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	-	-	111.540.000	164.540.000	468.000.000	-	-	106.005.400	160.364.950	460.408.265	-	-	95,04	97,46	98,38	116	119
2	Kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan	-	2.543.510.700	5.412.674.950	3.008.536.590	3.552.273.280	-	2.353.315.597	4.768.024.562	2.047.322.525	3.419.212.190	-	92,52	88,09	68,05	96,25	29	38
3	Kegiatan pengembangan bibit ikan unggul	-	641.453.100	-	-	-	-	566.516.650	-	-	-	-	88,32	-	-	-	-	-
VII	Program peningkatan pemasaran hasil produksi ternak	-	-	103.000.000	51.000.000	355.000.000	-	-	99.907.500	49.004.650	349.742.195	-		97,00	96,09	98,25	273	281
1	Kegiatan gerakan gemar makan ikan	-	-	103.000.000	51.000.000	355.000.000	-	-	99.907.500	49.004.650	349.742.195	-	-	97,00	96,09	98,25	273	281
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2010-2015																		
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	127.500.000	124.000.000	126.425.000	133.826.200	100.494.334	115.977.505	121.140.109	120.219.917	132.487.938	122.294.334	91	98	95	99	122	(5)	4,6%
1.	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	127.500.000	124.000.000	126.425.000	133.826.200	100.494.334	115.977.505	121.140.109	120.219.917	132.487.938	122.294.334	91	98	95	99	122	(5)	4,6%

II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	32.000.000	40.500.000	44.600.000	62.408.610	47.500.000	32.000.000	40.470.500	44.595.710	61.646.500	37.800.000	100	100	100	99	80	13,2	25,0
2.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana	25.000.000	30.000.000	35.700.000	52.408.610	37.500.000	25.000.000	29.970.500	35.695.710	52.146.500	31.000.000	100	100	100	99	83	14,3	28,4
3.	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.000.000	10.500.000	8.900.000	10.000.000	10.000.000	7.000.000	10.500.000	8.900.000	9.500.000	6.800.000	100	100	100	95	68	11,8	13,8
III.	Program peningkatan disiplin aparatur	-	-	-	6.300.000	-	-	-	-	6.300.000	-	-	-	100	-	-	-	-
4.	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	-	-	-	6.300.000	-	-	-	-	6.300.000	-	-	-	100	-	-	-	-
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	750.000	1.050.000	3.000.000	45.000.000	24.000.000	750.000	1.050.000	3.000.000	44.900.000	24.000.000	100	100	100	100	100	394,8	394,0
5.	Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	-	40.000.000	21.000.000	-	-	-	39.900.000	21.000.000	-	-	-	100	100	(47,5)	(47,4)
6.	Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	750.000	1.050.000	3.000.000	5.000.000	3.000.000	750.000	1.050.000	3.000.000	5.000.000	3.000.000	100	100	100	100	100	63,1	34,3
V.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	2.200.000	10.000.000	10.000.000	-	-	2.200.000	9.900.000	5.000.000	-	-	100	99	50	177,3	150,3
7.	Kegiatan Peningkatan Sumberdaya Aparatur	-	-	2.200.000	10.000.000	10.000.000	-	-	2.200.000	9.900.000	5.000.000	-	-	100	99	50	177,3	150,3
VI.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	50.000.000	40.010.000	40.000.000	40.000.000	37.500.000	49.923.000	39.900.000	39.972.950	39.972.950	65.000.000	100	100	100	100	173	(6,6)	(6,6)

8.	Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	50.000.000	40.010.000	40.000.000	40.000.000	37.500.000	49.923.000	39.900.000	39.972.950	39.972.950	65.000.000	100	100	100	100	173	-6,6%	10,7
VI	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	902.505.000	1.236.506.000	1.784.299.810	1.392.711.651	1.030.000.000	745.084.300	882.401.490	1.594.421.765	1.318.721.800	1.390.795.943	83	71	89	95	135	(26,0)	5,5
9.	Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan	-	37.000.000	-	20.000.000	20.000.000	-	-	-	19.900.000	41.795.943	-	-	-	100	209	0,0	110,0
10	Kegiatan Pengembangan Lumbung pangan desa	727.505.000	902.506.000	1.742.799.810	1.052.711.651	770.000.000	715.147.300	827.563.400	1.553.017.000	979.021.800	1.129.000.000	98	92	89	93	147	12,7	20,4
11	Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	20.000.000	30.000.000	30.000.000	300.000.000	120.000.000	19.999.000	29.962.000	29.981.835	299.900.000	175.000.000	100	100	100	100	146	222,5	227,1
12	Kegiatan Penumbuhan/ Pengembangan Desa Mandiri Pangan	125.000.000	242.000.000	-	-	100.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	25	(3,2)	
13	Kegiatan Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan	30.000.000	25.000.000	11.500.000	20.000.000	20.000.000	9.938.000	24.876.090	11.422.930	19.900.000	20.000.000	33	100	99	100	100	0,8	42,7

Berdasarkan indikator kinerja sasaran Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan dan indikator kinerja sasaran Renstra Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2010-2015 terdapat beberapa capaian dibidang perikanan dan pangan sebagaimana digambarkan berikut :

1. Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya

Perkembangan produksi perikanan budidaya dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 4. : Produksi Perikanan Budidaya dan Pertumbuhannya dari Tahun 2011 - 2015

No	Uraian	Produksi Perikanan Budidaya (ton) dan Persentase Pertumbuhannya								
		2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015
1	Produksi perikanan budidaya	1.277,23	28,9	1.646,36	28,28	2.112	34,71	2.845,09	5,39	2.998,42

Produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan persentase yang berbeda. Peningkatan produksi ini terutama berasal dari peningkatan produksi petani budidaya lele dengan kelompok dan anggota masyarakat yang telah terbentuk usaha (usaha budidaya dan pemasaran) yang telah dikelola oleh kelompok bersama dengan anggota lainnya dan tingginya permintaan pasar akan komoditi ikan ini, disamping adanya bantuan benih ikan dari berbagai program pemerintah dan pembinaan pemerintah melalui Cara Budidaya Ikan yang Baik, Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan memfasilitasi akses permodalan melalui perbankan untuk peningkatan modal usaha. Komoditi unggulan Kabupaten Solok dari sektor perikanan adalah ikan mas dan ikan nila.

2. Perkembangan Produksi Perikanan Perairan Umum

Perkembangan produksi perikanan perairan umum dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. : Produksi Perikanan Perairan Umum dan Pertumbuhannya dari Tahun 2011 - 2015

No	Uraian	Produksi Perikanan Perairan Umum (ton) dan Persentase Pertumbuhannya								
		2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015
1	Produksi perikanan tangkap	241,80	26,39	305,60	18,25	362,20	8,73	393,82	3,27	406,7

Produksi perikanan perairan umum mengalami peningkatan setiap tahunnya namun dengan persentase pertumbuhan yang semakin berkurang. Pertumbuhan yang semakin berkurang ini

disebabkan karena perubahan iklim/kemarau panjang dan semakin berkembangnya bagan dengan mata jaring yang berukuran kecil yang menyebabkan ikan-ikan yang berukuran besar sampai kecil ikut terbawa. Hal ini akan berakibat punahnya ikan yang berada di danau tersebut.

Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah telah melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi masyarakat dengan alat tangkap berupa jaring dengan mata jaring yang berukuran lebih besar serta adanya kegiatan konservasi perikanan melalui pengadaan reservat, pengembangan lubang larangan dan pemasangan plang ikan larangan.

3. Ketersediaan energi dan protein perkapita

Angka ketersediaan energi dan protein perkapita Kabupaten Solok sampai kondisi 2015 sudah melebihi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang direkomendasikan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke X tahun 2012 dimana AKG tingkat ketersediaan untuk energi adalah 2.400 kkal/kap/hal sementara ketersediaan energi perkapita Kabupaten Solok berjumlah 7.060 kkal/kap/hari.

Bila dilihat dari kelompok pangan maka kelompok pangan hewani, minyak dan lemak, buah, biji berminyak, kacang-kacangan dan gula ketersediaan energi belum mencapai target yang direkomendasikan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke X tahun 2012.

Sedangkan angka ketersediaan protein yang direkomendasikan WNPG ke X tahun 2012 adalah 63 gram/kap/hari dan pencapaian Kabupaten Solok sebesar 165,22 gram/kap/hari.

Penyebab tingginya ketersediaan energi per kapita dan protein per kapita dari yang ditetapkan dalam SPM bidang Ketahanan Pangan yakni :

1. Sebagian besar penduduk kabupaten Solok bekerja di sektor pertanian.
2. Sektor pertanian yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah pertanian tanaman pangan.
3. Kondisi geografis Kabupaten Solok cocok untuk budidaya tanaman pangan.
4. Jumlah produksi tanaman pangan terutama padi melebihi konsumsi penduduk Kabupaten Solok.

Sedangkan untuk angka ketersediaan energy untuk dikonsumsi masyarakat Kabupaten Solok tahun 2011-2015 adalah sebagaimana table berikut :

Tabel 6. : Ketersediaan Energi untuk Dikonsumsi Masyarakat Kabupaten Solok Tahun 2011 - 2015

No	Uraian	Konsumsi Energi dan Protein Masyarakat				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Konsumsi Energi (kkal/kap/thn)	1.771,8	1.942,9	1.900,2	1.915,9	2.079,1
2	Konsumsi Protein (gram/kap/thn)	42,3	46,0	49,0	50,3	51,1

4. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah

Cadangan pangan dimaksudkan untuk penanganan masalah rawan pangan. Sesuai dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan, tiap-tiap pemerintah daerah tingkat II (kabupaten/ kota) harus memiliki cadangan pangan milik pemerintah sebesar 100 ton ekuivalen beras sampai akhir tahun 2015. Sampai dengan tahun 2015 cadangan pangan pemerintah Kabupaten Solok hanya berada pada angka 20 ton (33%) dari target 60 ton (60%). Rendahnya pencapaian ini dikarenakan beberapa hal yakni :

1. Keterbatasan APBD Kabupaten Solok.
2. Kabupaten Solok adalah daerah sentra produksi padi.
3. Akses jalan antar kabupaten/ kota lancar.

5. Pengembangan Lumbung Pangan

Lumbung Pangan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan dengan sistem tunda jual, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dikelola secara berkelompok.

Pengembangan lumbung pangan masyarakat sampai kondisi 2015 sudah berjumlah 23 kelompok dan yang telah diisi melalui bantuan pemerintah pusat melalui dana dekonsentrasi sebanyak 20 kelompok. Pengembangan lumbung pangan masyarakat Kabupaten Solok berada pada tingkat pasca mandiri sebanyak 12 kelompok

dan tingkat pengembangan 8 kelompok sedangkan 3 kelompok masih belum ada memperoleh bantuan untuk pengisian lumbung.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia juga sebagai salah satu hak asasi dengan harapan terbebasnya masyarakat dari kekurangan pangan/kelaparan. Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa ketersediaan pangan harus dipenuhi ditingkat wilayah dan rumah tangga.

Ketersediaan pangan yaitu menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu : (1) produksi dalam negeri, (2) import pangan dan (3) pengelolaan cadangan pangan.

Kabupaten Solok mempunyai keunggulan komparatif di bidang pertanian, dengan berbagai potensi yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai komoditi seperti pangan, hortikultura, peternakan maupun perikanan. Potensi yang dimiliki antara lain iklim dan agroekosistem yang sesuai, tersedianya sumberdaya genetik yang melimpah, tersedianya SDM (petani dan petugas), dukungan kebijakan pemerintah dan jumlah penduduk besar.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok, perlu dilakukan analisa terhadap kondisi objektif perikanan dan pangan. Meskipun memiliki potensi yang besar, pembangunan perikanan dan pangan di Kabupaten Solok masih menghadapi berbagai tantangan berkenaan dengan penerapan teknologi, kondisi sumberdaya alam, prasarana dan sarana produksi, sumberdaya manusia dan kelembagaan, keanekaragaman dan keamanan pangan masyarakat.

Dalam penyusunan rencana strategis terhadap pelayanan bidang perikanan dan ketahanan pangan, juga perlu diperhatikan rencana tata ruang wilayah kabupaten karena terkait erat dengan kebutuhan lahan dan arah pengembangan wilayah. Salah satu rencana struktur ruang yang terkait dengan pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan yaitu pembentukan kawasan budidaya perikanan, pertanian dan peternakan. Berdasarkan analisa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten

Solok sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013, pada pasal 3 ayat 2 yaitu untuk mewujudkan penataan ruang wilayah Kabupaten Solok ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Solok. Pada tabel 6 berikut ini dijelaskan hasil telaahan struktur ruang wilayah.

Tabel 7. : Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Solok

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengelolaan kawasan budidaya mendukung pengembangan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, pariwisata, dan industri dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup	Terjadi alih fungsi lahan didaerah sentra produksi	1. Program Peningkatan Produksi Pertanian 2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak 3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 4. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Berkurangnya luas lahan pertanian produktif (pangan, hortikultura, peternakan, perikanan)	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Solok

Berdasarkan analisa RTRW Kabupaten Solok pasal 30 diatur suatu kawasan peruntukan pertanian terdiri atas: kawasan pertanian tanaman pangan; kawasan hortikultura; kawasan perkebunan; kawasan perikanan dan kawasan peternakan. Kawasan peternakan diarahkan diseluruh kecamatan.

Sedangkan kawasan peruntukan perikanan berdasarkan pasal 30 terdiri atas; budidaya perikanan air tawar dan perikanan tangkap perairan danau. Kawasan peruntukan budidaya air tawar dengan luas kurang lebih 10.182,5 ha yang terdiri atas pengembangan kegiatan budidaya ikan sawah meliputi seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Danau Kembar, pengembangan kegiatan budidaya ikan karamba meliputi seluruh kecamatan kecuali Kecamatan X Koto Singkarak, pengembangan kegiatan budidaya ikan di kolam air tawar meliputi

Kecamatan X Koto Singkarak, Gunung Talang, Bukit Sundi, Kubung dan X Koto Diatas, pengembangan kegiatan budidaya saluran di irigasi meliputi Kecamatan Junjung Sirih, X Koto Singkarak, Lembang Jaya, Bukit Sundi, Gunung Talang, Kubung, Pantai Cermin, Lembah Gumanti, Hiliran Gumanti dan X Koto Singkarak.

Kawasan peruntukan perikanan tangkap perairan danau dengan luas 168,95 hameliputi Kecamatan X Koto Singkarak, Lembah Gumanti, Junjung Sirih dan Danau Kembar.

Strategi ini dilakukan untuk mempertahankan lahan sawah berkelanjutan serta peningkatan produksi pertanian, perikanan dan peternakan guna menjaga ketahanan pangan daerah. Hasil telaahan pola ruang wilayah Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. : Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Solok

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kawasan Budidaya / Pertanian	Pemanfaatan kawasan pertanian tanaman pangan; kawasan hortikultura; kawasan perkebunan; kawasan perikanan dan kawasan peternakan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan produksi pertanian, perikanan dan peternakan. 2. Program pemberdayaan sumberdaya pertanian 3. Pencegahan dan Penanggulangan penyakitnamin, ternak dan ikan 4. Pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan 5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ Perkebunan) 6. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan benih dan induk ikan - Ketersediaan sumber pakan ikan - Ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana perikanan - Ketersediaan lahan pertanian sebagai sumber pangan masyarakat 	<p>Zonasi Kawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan budidaya perikanan air tawar di sawah meliputi seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Danau Kembar. - Kawasan budidaya ikan karamba meliputi seluruh kecamatan kecuali Kecamatan X Koto Singkarak - Kawasan budidaya ikan di kolam air deras meliputi kecamatan X Koto Singkarak, Gunung Talang, Bukit Sundi, Kubung dan X Koto Diatas. - Kawasan budidaya ikan di saluran irigasi meliputi Kecamatan Jj Sirih, X KotoSingkarak, Lbg Jaya, B.Sundi, Gunung Talang, Kubung, P. Sekaki, P. Cermin, L. Gumanti, Hiliran Gumanti dan IX Koto S. Lasi

			7. Program Pengembangan Perikanan Tangkap		<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan peruntukkan perikanan tangkap perairan danau meliputi Kecamatan Koto Singkarak, Lembah Gumanti, Junjung Sirih dan Danau Kembar, kawasan peruntukkan kegiatan budidaya ikan keramba jaring apung (KJA). - Kawasan peruntukan pertanian sawah meliputi seluruh kecamatan kecuali Kec. Danau Kembar
--	--	--	---	--	---

Agar kebijakan, rencana dan program daerah dapat terintegrasi dan menyatu dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan maka salah satu upaya dilakukan oleh pemerintah adalah melalui penyusunan KLHS. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu rangkaian analisis yang menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan daerah.

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah Provinsi dan/atau kabupaten/kota wajib memasukkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Dasar penyusunan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana mengamanatkan perlunya dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Berdasarkan hasil analisa terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Solok terhadap pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 9. : Hasil Analisis Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Solok Terhadap pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan Dinas	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan Dinas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembangunan perekonomian masyarakat secara terpadu berbasis teknologi dan pelestarian lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemungkinan dapat terjadi konflik kepemilikan lahan apabila pembangunan sarana dan prasarana pemerintah di tanah milik pemerintah akan dibangun jika sebelumnya dikuasai oleh masyarakat. 2. Terjadinya alih fungsi lahan akibat pembangunan fisik sektor ekonomi. 3. Peningkatkan jumlah limbah cair dan padat yang berpotensi mencemari air akibat peningkatan produktifitas sektor ekonomi seperti penggunaan pestisida, pupuk, limbah industri dan lain-lain. 4. Rusaknya ekosistem perairan danau akibat meningkatnya penggunaan keramba jaring apung di danau. 5. Punahnya habitat asli (ikan asli) perairan umum akibat teknik penangkapan ikan perairan umum yang tidak ramah lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya produksi perikanan, peternakan dan pertanian karena berkurangnya luas lahan dan akibat pencemaran tanah dan air. - Menurunnya produksi perikanan tangkap (perairan umum) akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. - Matinya ikan budidaya karamba jaring apung akibat terjadi upwelling/ umbalan - Terganggunya keamanan dan mutu produk pangan yang dihasilkan akibat penggunaan pestisida dan pupuk kimia untuk peningkatan produksi pangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan teknologi tepat guna di sektor perikanan, peternakan dan pertanian yang ramah lingkungan. - Pembatasan keramba jaring apung (KJA) perairan danau sesuai daya tampung - Peningkatan pengawasan dan restocking pada perairan umum - Pembuatan wilayah konservasi ikan (reservaat) dan lubuk larangan. - Perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga dapat diidentifikasi lahan yang berpotensi untuk pengembangan infrastruktur pembangunan dan sarana penunjang lainnya - Implementasi pembudidayaan ikan yang ramah terhadap lingkungan - Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan - Penyusunan regulasi pengelolaan perikanan perairan umum - Pengembangan pertanian organik

Tantangan Pelayanan yang dihadapi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok berdasarkan analisa Renstra Dinas Perikanan dan

Pangan, analisa RPJMD Kabupaten Solok, analisa RTRW, dan analisa KLHS yang sekaligus merupakan isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD adalah sebagai berikut :

1. Penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan yang dapat mengakibatkan musnahnya ikan endemik perairan umum
2. Serangan hama penyakit pada ikan
3. Daerah Kabupaten Solok merupakan daerah yang rawan terhadap bencana alam/banjir yang berakibat kegagalan panen ikan
4. Rendahnya sumberdaya manusia, kelembagaan dan kemampuan wira usaha (enterprenuership)
5. Adanya umbalan/upwelling di waktu tertentu yang mengakibatkan kematian ikan secara massal di danau
6. Penggunaan bahan pengawet pada produk ikan
7. Pengelolaan lumbung yang belum mampu memenuhi permintaan masyarakat pada daerah rawan transien (sementara)
8. SDM yang masih rendah dalam pengelolaan sumberdaya pangan
9. Sedikitnya jumlah took/kios yang bekerjasama dengan lembaga usaha pangan masyarakat
10. Rendahnya tingkat pengelolaan dan pemanfaatan pekarangan oleh keluarga
11. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang penganekaragaman pengolahan bahan pangan
12. Adanya daerah yang belum mampu memenuhi akses pangannya sendiri

Sedangkan peluang Dinas Perikanan dan Pangan terhadap peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Potensi sumberdaya alam yang mendukung usaha perikanan
2. Tingginya minat masyarakat dalam membudidayakan ikan
3. Tingginya permintaan akan hasil perikanan
4. Berkembangnya teknologi perikanan yang ramah lingkungan
5. Terbukanya peluang investasi untuk pengembangan perikanan dan pangan melalui skim pembiayaan dalam bentuk kredit dengan bunga rendah
6. Minat masyarakat untuk melakukan usaha pengolahan perikanan

7. Dukungan kebijakan pemerintah propinsi dan pusat dalam sektor perikanan dan ketahanan pangan
8. Potensi produksi bahan pangan yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
9. Tingginya permintaan masyarakat akan bahan pangan dan peningkatan pengetahuan masyarakat akan pentingnya gizi sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk
10. Tumbuhnya industri-industri pangan olahan
11. Tersedianya sumberdaya lahan pekarangan yang cukup luas di setiap rumah tangga
12. Peningkatan pendapatan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan
13. Tersedianya beranekaragam produk bahan pangan dan olahan pangan

Hasil analisis SWOT sektor perikanan dan pangan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Analisis SWOT	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threat)
EKSTERNAL	Dukungan potensi sumberdaya perikanan	Serangan hama penyakit pada ikan
	Tingginya minat masyarakat dalam membudidayakan ikan	Penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan
	Tingginya permintaan akan hasil perikanan	Daerah yang rawan terhadap bencana alam/banjir
	Berkembangnya teknologi perikanan	SDM pembudidaya dan nelayan yang masih rendah
	Adanya minat investasi dibidang perikanan	Adanya umbalan /upwelling di waktu tertentu yang mengakibatkan kematian ikan secara massal di danau
	Minat masyarakat untuk melakukan usaha pengolahan perikanan	Alih fungsi lahan ke non pertanian
	Dukungan kebijakan pemerintah propinsi dan pusat dalam sektor perikanan	Masih rendahnya mutu dan keamanan pangan
INTERNAL	Potensi produksi bahan pangan yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Pengelolaan lumpur yang belum mampu memenuhi permintaan masyarakat pada daerah rawan transien (sementara)

	Tingginya permintaan akan bahan pangan	SDM yang masih rendah dalam pengelolaan sumberdaya pangan
	Tumbuhnya industri-industri pangan olahan	Sedikitnya jumlah toko yang bekerjasama dengan lembaga usaha pangan masyarakat
	Sumberdaya lahan pekarangan yang cukup luas di setiap rumah tangga	Rendahnya tingkat pengelolaan dan pemanfaatan pekarangan oleh keluarga
	Peningkatan pendapatan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan	Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang penganekaragaman pengolahan bahan pangan
	Tersedianya beranekaragam produk bahan pangan	Adanya daerah yang belum mampu memenuhi akses pangannya sendiri
	Dukungan kebijakan pemerintah propinsi dan pusat dalam sektor ketahanan pangan	
Kekuatan (Strength)	Strategi Kekuatan dan Peluang (S.O)	Strategi Kekuatan dan Ancaman (S.T)
Adanya OPD yang menangani sektor perikanan	Optimalisasi kebijakan pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan, investasi dibidang perikanan dan dalam meraih dukungan dana pusat dan propinsi	Optimalisasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, bahaya bencana alam/banjir dan pengawasan mutu dan keamanan pangan
Tersedianya Balai Banih Ikan	Optimalisasi kualitas SDM yang tersedia dalam memfasilitasi minat masyarakat dalam pengembangan perikanan dan memaksimalkan potensi sumberdaya perikanan	Optimalisasi kualitas SDM dalam mengatasi serangan hama penyakit, mutu dan keamanan pangan serta ancaman umbalan/upwelling
Adanya kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan perikanan	Peningkatan pemanfaatan sarana BBI dalam pengembangan perikanan	
Kualitas SDM aparatur perikanan yang memadai		
Adanya OPD yang menangani sektor ketahanan pangan	Peningkatan kuantitas aparatur dalam upaya fasilitasi pemanfaatan potensi produksi bahan pangan, pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan, pengembangan keanekaragaman produk olahan dan usaha pangan	Peningkatan pengelolaan lumbung pangan dan cadangan pangan pemerintah, pemanfaatan pekarangan, lembaga usaha pangan masyarakat dalam mengatasi daerah yang

	olahan	belum mampu mengakses pangan dan pada daerah rawan pangan transien
Tersedianya gudang dan cadangan pangan pemerintah	Peningkatan sarana pengujian mutu hasil dan keamanan pangan dalam upaya peningkatan mutu dan keamanan pangan	Peningkatan pengawasan dalam upaya peningkatan mutu dan keamanan pangan
Adanya kebijakan pemerintah daerah peningkatan ketahanan pangan	Penyediaan dan peningkatan kualitas SDM petugas mutu dan keamanan pangan	Peningkatan pemberdayaan petugas pengawas mutu melalui pendidikan dan pelatihan
		Penyediaan cadangan pangan pemerintah dalam upaya penanganan daerah rawan pangan
Kelemahan (Weakness)	Strategi Kelemahan dan Peluang (WO)	Strategi Kelemahan dan Ancaman (WT)
Kurangnya kuantitas aparatur yang menangani perikanan	Peningkatan kuantitas aparatur perikanan dalam upaya pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan, memfasilitasi minat masyarakat dalam pengembangan perikanan dan penerapan teknologi perikanan	Peningkatan pemantauan sumberdaya perikanan terhadap pengaruh penggunaan bahan berbahaya dan bahaya umbalan
Belum memadainya sarana dan prasarana perikanan	Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana perikanan	Peningkatan jumlah dan kualitas sdm pembudidaya dan pengolah hasil perikanan
Belum adanya regulasi tentang perikanan	Peningkatan penggunaan teknologi perikanan	Peningkatan teknologi dalam upaya pemberantasan hama penyakit perikanan
Terbatasnya dukungan APBD Kabupaten	Penyusunan SOP guna mendukung pengembangan perikanan	
Masih terbatasnya SOP dalam pengembangan perikanan	Penyusunan regulasi dalam pengembangan perikanan	
Pemanfaatan teknologi perikanan yang belum optimal	Peningkatan SDM dan teknologi dalam rangka meraih pangsa pasar perikanan	
Kurangnya kuantitas aparatur yang menangani sektor ketahanan pangan	Peningkatan kuantitas aparatur dalam upaya fasilitasi pemanfaatan potensi produksi bahan pangan, pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan, pengembangan keanekaragaman produk olahan dan usaha pangan olahan	Peningkatan pengelolaan lumbung pangan, pemanfaatan pekarangan, lembaga usaha pangan masyarakat dalam mengatasi daerah yang belum mampu mengakses pangan dan pada daerah rawan pangan transien

Belum tersedianya alat uji mutu hasil dan keamanan pangan	Peningkatan sarana pengujian mutu hasil dan keamanan pangan dalam upaya peningkatan mutu dan keamanan pangan	Peningkatan pengawasan dalam upaya peningkatan mutu dan keamanan pangan
Belum adanya petugas pengawas mutu dan keamanan pangan	Penyediaan dan peningkatan kualitas SDM petugas mutu dan keamanan pangan	Peningkatan pemberdayaan petugas pengawas mutu melalui pendidikan dan pelatihan
Terbatasnya dukungan APBD Kabupaten		
Belum tercukupinya ketersediaan cadangan pangan pemerintah		Penyediaan cadangan pangan pemerintah dalam upaya penanganan daerah rawan pangan
Belum adanya regulasi tentang lahan pangan berkelanjutan		Penyusunan regulasi lahan pangan berkelanjutan dalam upaya mengatasi alih fungsi lahan ke non pertanian

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sektor perikanan dan pangan merupakan penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Solok. Namun dalam pelaksanaan pelayanan sekaitan dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Perikanan dan Pangan masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang mengancam ketersediaan pangan daerah. Lahan pertanian Kabupaten Solok saat ini berdasarkan Database Pertanian tahun 2012 seluas 334.369 ha dan pada tahun 2016 menjadi seluas 334.055 ha. Hal ini disebabkan karena belum adanya regulasi tentang lahan pangan berkelanjutan di Kabupaten Solok.
2. Belum memadainya sarana dan prasarana perikanan
3. Terbatasnya dukungan APBD Kabupaten dalam menunjang kegiatan sektor perikanan dan pangan
4. Masih rendahnya kuantitas aparatur yang menangani perikanan dan pangan
5. Masih terbatasnya SOP dalam pengembangan perikanan
6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi perikanan di tengah masyarakat
7. Belum tersedianya alat uji mutu hasil dan keamanan pangan
8. Belum adanya petugas pengawas mutu dan keamanan pangan
9. Belum tercukupinya ketersediaan cadangan pangan pemerintah dengan jumlah saat ini sebanyak 30 ton sementara berdasarkan SPM sampai tahun 2015 cadangan pangan pemerintah kabupaten berjumlah 100 ton.
10. Penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan
11. Masih tingginya ancaman terhadap hama dan penyakit ikan
12. Masih adanya daerah yang mengalami kerawanan pangan yang mengakibatkan kondisi ketahanan pangan menjadi sangat rentan
13. Masih belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat dan perlu dikembangkannya diversifikasi pangan
14. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM perikanan dan pangan serta rendahnya kemampuan wira usaha (enterprenuership)

15. Masih rendahnya mutu dan keamanan produk hasil perikanan dan pangan
16. Belum adanya regulasi tentang Perikanan Kabupaten Solok
17. Masih rendahnya keanekaragaman produk olahan hasil perikanan
18. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna perikanan dan pangan
19. Masih rendahnya kualitas kelembagaan nelayan, pembudidaya ikan dan kelembagaan pangan lainnya
20. Adanya umbalan /upwelling di waktu tertentu yang mengakibatkan kematian ikan secara massal di danau
21. Pengelolaan lumbung yang belum mampu memenuhi permintaan masyarakat pada daerah rawan transien (sementara)
22. Sedikitnya jumlah toko yang bekerjasama dengan lembaga usaha pangan masyarakat
23. Rendahnya tingkat pengelolaan dan pemanfaatan pekarangan oleh keluarga
24. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang penganekaragaman pengolahan bahan pangan

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dalam penentuan kebijakan dan strategi dalam membangun perikanan dan pangan di Kabupaten Solok kedepan, perlu analisis faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal yang sangat dominan berpengaruh dalam proses pembangunan.

Dari permasalahan pada sektor perikanan dan pangan, maka isu strategis yang menjadi acuan dan perhatian utama sebagai daerah dengan sumber mata pencaharian penduduknya ada pada sektor pertanian, dibutuhkan perhatian dan keseriusan yang lebih besar agar mampu mengembangkan pertanian (pertanian, peternakan, perikanan) yang berkualitas, bernilai tambah tinggi dan berdaya saing dengan berbasis sumberdaya lokal.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang daerah pada tahap ketiga.

Berbagai isu global dan nasional perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan

masyarakat. Dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan, maka Pemerintah Kabupaten Solok menuangkan visi yang hendak dicapai dalam RPJMD 2016-2021 yaitu ***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok yang Maju Menuju Kehidupan Masyarakat Madani dalam Nuansa Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah.***

Untuk mewujudkan visi, maka perlu adanya misi tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha untuk mewujudkannya. Misi juga memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Solok, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mensukseskan program wajib belajar (wajib) 12 tahun.
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat.
3. Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan infrasarana infrastruktur yang memadai
4. Membangun karakter masyarakat sesuai filosofi “Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah”, didukung oleh Pemerintahan Nagari (Nagari Adat) kuat dengan meningkatkan peran Tungku Sajarangan (ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai) dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.
5. Memantapkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good clean governance)

Program prioritas yang dilaksanakan guna mendukung visi misi ini dilaksanakan melalui Empat Pilar Pembangunan Kabupaten Solok yakni :

1. Pilar Pendidikan
2. Pilar Kesehatan
3. Pilar Ekonomi Kerakyatan dengan program prioritas: a). Penguatan Kedaulatan Pangan, b). Peningkatan Infrastruktur Daerah dalam rangka perluasan akses ekonomi, c). Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pembangunan
4. Pilar Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

Untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan adalah mendukung pencapaian kebijakan Empat Pilar Pembangunan yakni pilar ketiga, **Pilar Ekonomi Kerakyatan** dengan tiga program prioritas guna mendukung penguatan kedaulatan pangan dari sektor perikanan dan pangan, peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung

perikanan dan pangan serta pengurangan tingkat kemiskinan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil produk perikanan.

Pilar ekonomi kerakyatan ini merupakan bagian dari **Misi Ketiga** pembangunan Kabupaten Solok yakni *Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai* melalui berbagai program kegiatan, kebijakan dan strategi yang dilaksanakan.

Telaahan terhadap visi, misi dan tujuan Bupati dan Wakil Bupati Solok Periode 2016-2021 dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

Tabel 10. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Agenda Bupati dan Wakil Bupati Solok Periode 2016-2021

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat yang Madani dalam Nuansa Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah				
No	Misi dan Agenda Bupati dan Wakil Bupati Solok Periode 2016-2021	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<p>Misi 3. Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai</p> <p>Tujuan. Meningkatkan perekonomian masyarakat</p> <p>Sasaran I. Meningkatny</p>	<p>a. Alih fungsi lahan ke non pertanian</p> <p>b. Penggunaan sarana produksi dan teknologi tepat guna belum optimal</p> <p>c. Infrastruktur yang belum memadai</p> <p>d. Penanganan pasca produksi dibidang pengolahan dan pemasaran hasil belum optimal</p>	<p>a. Belum adanya regulasi di daerah dalam Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan</p> <p>b. Mahalnya agroinput(sarana produksi dan alat mesin)</p> <p>c. Menurunnya minat terhadap usaha tani (termasuk perikanan)</p> <p>d. Kemampuan akses petani terhadap permodalan masih terbatas.</p> <p>e. Penerapan teknologi tepat</p>	<p>a. MoU antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah dalam peningkatan produksi menuju pencapaian ketahanan pangan</p> <p>b. Komitmen pimpinan dalam peningkatan ketahanan pangan.</p> <p>c. Ketersediaan sumber daya perikanan</p> <p>d. Produksi pangan utama (beras) yang surplus</p> <p>e. Ketersediaan lembaga penelitian dan pengkajian teknologi pertanian (BPTP)</p> <p>f. Dukungan Pemerintah Pusat dan propinsi dalam pembiayaan</p> <p>g. Ketersediaan unit kerja sampai ke wilayah kecamatan (Balai Benih Ikan)</p>

	<p>a nilai investasi dan kontribusi sektor unggulan</p> <p>Sasaran 2. Meningkatkan ketahanan pangan</p>	<p>e. Masih berkembangnya hama dan penyakit pada ikan.</p> <p>f. Masih rendahnya kualitas sumberdaya dan kelembagaan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolahan hasil perikanan</p> <p>g. Pengelolaan sumberdaya perikanan yang tidak ramah lingkungan</p> <p>h. Masih rendahnya mutu dan keamanan produk pangan</p> <p>i. Masih belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat</p> <p>j. Harga pangan yang masih berfluktuasi</p>	<p>guna terbatas</p> <p>f. Usaha perikanan masih merupakan usaha sampingan</p> <p>g. Keterbatasan sumberdaya manusia dalam pengawasan keamanan produk pangan</p> <p>h. Belum adanya regulasi di daerah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan perairan umum daratan</p> <p>i. Belum semua produk pangan punya ketetapan Harga Pembelian Pangan (HPP) oleh pemerintah</p>	
--	---	---	--	--

3.3. Telaahan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan dalam RPJMD Kabupaten Solok

RPJMD tahun 2016-2021 merupakan acuan bagi Renstra Dinas Perikanan dan Pangan tahun 2016-2021 yang artinya indikator kinerja Dinas Perikanan dan Pangan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Perikanan dan Pangan yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Solok, Dinas Perikanan dan Pangan berkontribusi untuk mewujudkan sebagian Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut: (1) Meningkatnya SDM aparatur dalam pengelolaan administrasi pemerintahan; (2) Meningkatnya

produksi, produktivitas dan mutu produk komoditi unggulan; (3) Mencari peluang pasar dan akses pemasaran produk perikanan dan pangan; (4) Meningkatnya penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna; (5) Mengembangkan kawasan sentra produksi perikanan; (6) Melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perikanan dan pangan; dan (7) Meningkatnya kegiatan pencegahan dan pemberantasan serta pengendalian hama/penyakit pada ikan.

Berdasarkan telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 terdapat beberapa faktor-faktor penghambat maupun pendorong dari Dinas Perikanan dan Pangan yang mempengaruhi pelayanan dinas ditinjau dari sasaran RPJMD. Adapun faktor-faktor yang terkait sebagai penghambat dan pendorong dirinci pada tabel berikut:

Tabel 11. Faktor Penghambat dan Pendorong yang Mempengaruhi Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Ditinjau dari Sasaran RPJMD

No	Sasaran RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terjaganya ketersediaan pangan	1. Masih rendahnya mutu dan keamanan produk pangan	1. Mahalnya agroinput (saranaproduksi, peralatan dan mesin)	1. Ketersediaan sumber dayaperikanan dan pangan
2.	Peningkatan diversifikasi pangan	2. Masih belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat	2. Semakin tingginya alih fungsi lahan	2. Ketersediaan dukungan anggaran dari pusat danpropiinsi.
3.	Meningkatkan keamanan pangan segar	3. Keterbatasan anggaran daerah untuk pembangunanperikanan	3. Kemampuanpermodalan petani terbatas	3. Produksi pangan utama (beras) yang surplus
4.	Meningkatkan kesejahteraan petani dan pembudidaya ikan	4. Akses terhadap data dan informasi agribisnis belum optimal	4. Masih adanya daerah yang mengalami kerawanan pangan	4. Ketersediaan Lembaga Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian
5.	Meningkatkan pelayanan publik yang prima ditingkat Nagari, Kecamatan dan	5. Penggunaan sarana produksi dan teknologi tepat guna belum optimal. 6. Penanganan pasca produksi dibidang		

6.	Kabupaten Meningkatkan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas	<p>pengolahan dan pemasaran hasil belum optimal</p> <p>7. Masih berkembangnya hama dan penyakit pada ikan</p> <p>8. Masih rendahnya kualitas sumberdaya kelembagaan</p> <p>9. Kompetensi aparatur dinas belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan</p>		<p>5. Ketersediaan bantuan fasilitas sarana prasarana perikanan</p> <p>6. Ketersediaan unit kerja sampai ke wilayah kecamatan (Balai Benih Ikan).</p>
----	---	---	--	---

Tabel 12. Keterkaitan Program Renstra Dinas Perikanan dan Pangan dan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021

Misi ke 3 RPJMD : Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai								
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	
1	Meningkatkan perekonomian masyarakat	Meningkatkannya ketahanan pangan	Ketersediaan pangan utama (beras)	Meningkatkan produksi dan diversifikasi pangan	Peningkatan cadangan dan diversifikasi pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan utama perkapita	
			Fluktuasi harga ditingkat konsumen (Coefisien Variasi/CV)					
			Skor PPH	Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan	Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Skor PPH	
				Meningkatkan keamanan pangan	Peningkatan pengawasan pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat	
	Meningkatkan nilai investasi dan kontribusi sektor unggulan	PDRB pertanian : kehutanan dan perikanan	Meningkatkan produktifitas dan nilai tambah sektor	Peningkatan produksi hasil pertanian dan perikanan	Peningkatan produksi hasil pertanian dan perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya	

				pertanian, perikanan dan peternakan		Program Pengemban- gan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan perairan umum
						Program Peningkat- an Kesejahter- aan Petani	Jumlah pelaku utama ya g mendapatk- an sertifikasi mutu hasil perikanan
Misi ke 5 RPJMD : Memantapkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good and clean governance)							
2	Meningk- atkan tata kelola pemerint- ahan daerah	Meningkat- nya Akuntabili- tas kinerja dan transpa- ransi penyeleng- garaan pemerinta- han daerah	Nilai SAKIP Kabupa- ten	Meningkat- kan sinkronisa- si perencana- an, pengangga- ran dan pelaksana- an pembangun- an daerah	Peningkatan penataan penyelengga- raan pemerinta- han	Program pelayanan administra- si perkantoran	Indeks Kepuasan masyara- kat
						Program Peningkat- an Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang mempunya- i kondisi baik
						Program Peningkat- an Pengemban- gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP

3.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mempunyai visi tahun 2015-2019, yaitu: **“Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan”**. Dalam mencapai visi tersebut, Badan Ketahanan Pangan mengemban misi tahun 2015-2019, sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
2. Memantapkan penanganan kerawanan pangan;
3. Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok;
4. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;

5. Mewujudkan keamanan pangan segar.

Sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2015-2019 adalah: (1) Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri; (2) Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga; (3) Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (tahun 2019). Adapun target kinerja dari masing-masing indikator kinerja utama tersebut sebagai berikut:

Tabel 13. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian Sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2015-2019

No	Indikator Kinerja Utama	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Skor PPH ketersediaan	87,52	89,71	92,04	94,25	96,32
2.	Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan (%)	1	1	1	1	1
3.	Stabilnya harga pangan (Gabah/Beras) ditingkat produsen	≥ HPP				
4.	Stabilnya harga pangan (Beras) di tingkat konsumen	CV<5%	CV<5%	CV<5%	CV<5%	CV<5%
5.	Konsumsi Energi (kkal/kap/hr)	2.004	2.040	2.077	2.113	2.150
6.	Konsumsi Protein (gram/kap/hr)	56,1	56,4	56,6	56,8	57,0
7.	Skor PPH Konsumsi	84,1	86,2	88,4	90,5	92,5
8.	Jumlah pengawas keamanan pangan segar yang terserifikasi	81	160	245	330	400

Dalam upaya mendukung dan terarahnya pelaksanaan pembangunan perikanan dan ketahanan pangan pada dinas-dinas terkait di lingkup Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat juga menetapkan rencana strategisnya mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Propinsi Tahun 2016-2021 dan dikaitkan dengan rencana strategis pada kementerian/lembaga.

Guna menjawab beragam tantangan pembangunan kedaulatan pangan Sumatera Barat Tahun 2016-2021, maka dirumuskan visi, misi,

tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dalam jangka menengah (2016-2021) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 13. Visi, Misi, tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
"Terwujudnya Institusi yang Handal dalam Memantapkan Kemandirian Pangan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal"	1. Mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal	1. Meningkatkan penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal	1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam 2. Meningkatkan penanganan masyarakat rawan pangan
	2. Mewujudkan keterjangkauan pangan masyarakat.	2. Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok	3. Stabilitasnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen
	3. Mewujudkan keamanan pangan segar	3. Meningkatkan keamanan pangan segar	4. Tersedianya pangan segar yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat
	4. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal	4. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat yang B2SA (Beragam, Bergizi, seimbang dan aman) berbasis sumberdaya lokal	5. Meningkatnya diversifikasi pangan

Adapun Indikator kinerja serta target kinerja sasaran yang akan dicapai dalam 5 tahun (2016-2021) adalah sebagai berikut:

Tabel14 : Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam	Ketersediaan Energi (Kkal/kap /hari)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		Ketersediaan Protein (Gram/kap /hari)	63	63	63	63	63	63
		Meningkatnya cadangan pangan pemerintah Provinsi Sumbang (ton)	22	100	100	100	100	100
		Ketersediaan Pangan Utama (Beras)/ton	1.495.021	1.558.079	1.623.127	1.690.253	1.759.378	1.831.128
2	Meningkatnya penanganan masyarakat rawan pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	25	45	65	75	85	90
		Teratasinya masyarakat rawan pangan (kk)	86	106	110	110	110	110
3	Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen	Stabilisasi harga bahan pangan pokok (beras) di tingkat konsumen (CV)	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5
		Stabilisasi harga bahan pangan pokok (gabah dan beras) di tingkat produsen (≥ HPP)	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP
4	Tersedianya pangan segar yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat	Meningkatnya sertifikasi keamanan pangan segar (sertifikat prima)	30	100	100	100	100	100
		Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat (%)	75	76	77	78	79	80
5	Meningkatnya diversifikasi pangan	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) /%	84	84,6	85,2	85,8	86,4	87
6	Meningkatnya kualitas transparansi dan akuntabilitas pelaporan evaluasi kinerja dan sistem keuangan	Konsumsi Energi (Kkal/kap /hari)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

		Konsumsi Protein (Gram/ kap /hari)	52	52	52	52	52	52
7	Meningkatnya peran Badan Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan (kg/kap/th)	284,25	292,79	301,58	310,64	319,97	329,58
		Tersusunnya dokumen perencanaan (Dokumen)	2	2	2	2	2	2
		Tersusunnya laporan keuangan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan yang akuntabel, berkualitas dan transparansi (Dokumen)	2	2	2	2	2	2
		Kebijakan ketahanan pangan (buah)	1	1	1	1	1	1

Pembangunan sektor perikanan juga menjadi sasaran rencana pembangunan jangka menengah Sumatera Barat tahun 2016-2021. Pada rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 sasaran yang harus dicapai yaitu: (1) Berkurangnya kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan; (2) Meningkatnya penataan dan pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta perairan umum; (3) Meningkatnya produksi perikanan; (4) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan; (5) Meningkatnya mutu produksi hasil perikanan; (6) Meningkatnya pemasaran hasil perikanan dan konsumsi pakan.

Adapun indikator kinerja utama dan target sasaran yang harus dicapai tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel15 :Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Berkurangnya kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	- Kasus illegal fishing yang ditemukan (%)	55	50	45	40	35
2.	Meningkatnya penataan dan pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta perairan umum	- Luas kawasan konservasi dan rehabilitasi (ha) - Persentase kawasan pulau-pulau kecil yang dikelola (%)	420.275,95 6,49	420.280 7,57	420.284 8,65	420.288 9,73	420.292 10,81
3.	Meningkatkan produksi perikanan	- Produksi perikanan laut (ton) - Produksi perairan umum (ton) - Produksi perikanan budidaya (ton)	207.144,1 10.806 321.760,92	209.629,8 10.957 357.991,2	212.145,4 11.111 398.444,21	214.691,1 11.266 444.265,29	217.267,4 11.424 496.422,04
4.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan	- Pendapatan nelayan : • Nelayan Pemilik (Rp/kk/bln) • Nelayan Buruh (Rp/kk/bln) - Pendapatan pembudidaya (Rp/kk/bln)	8.600.000 1.850.000 3.000.000	9.200.000 1.970.000 3.200.000	9.800.000 2.230.000 3.500.000	10.400.000 2.375.000 4.000.000	11.000.000 2.500.000 4.500.000
5.	Meningkatkan mutu produksi perikanan	- Usaha perikanan budidaya yang mendapat sertifikat CBIB (unit) - BBI dan UPR yang mendapat sertifikat CPIB (unit) - Persentase nelayan yang menggunakan perahu bermotor (%)	895 70 96	905 90 97	915 110 98	925 130 99	935 150 100
6.	Meningkatnya pemasaran hasil perikanan dalam dan luar negeri	- Ekspor hasil perikanan (ton) - Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	2.500 35,16	2.625 35,33	2.765 35,5	2.893 35,67	3.076 35,84

Untuk mensinergikan tujuan dan sasaran dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan dan perikanan pada Renstra Propinsi dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, perlu dilakukan komparasi indikator kinerja Dinas Perikanan dan Pangan dengan target capaian pada sasaran rencana strategis pembangunan perikanan dan ketahanan pangan pemerintah Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat dan Kementerian/Lembaga terkait Tahun 2016-2021.

Tabel 16. Komparasi Target Capaian Sasaran Renstra terhadap Sasaran Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok, Renstra Propinsi dan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran Renstra Kabupaten	Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran Renstra Propinsi	Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Produksi perairan umum (ton) : 2016 = 447,00 2017 = 479,00 2018 = 503,00 2019 = 548,00 2020 = 597,00 2021 = 627,00 Produksi perikanan budidaya (ton) 2016 = 3.776 2017 = 4.456 2018 = 5.347 2019 = 6.417 2020 = 6.738 2021 = 7.075	Produksi perairan umum (ton) : 2016 = 10.806 2017 = 10.957 2018 = 11.111 2019 = 11.266 2020 = 11.424 Produksi perikanan budidaya (ton) : 2016 = 321.760,92 2017 = 357.991,2 2018 = 398.444,21 2019 = 444.265,29 2020 = 496.422,04	Produksi perikanan (juta ton) : 2015 = 24,12 2016 = 26,04 2017 = 30,29 2018 = 32,93 2019 = 39,97
2	Usaha perikanan budidaya yang mendapat sertifikat CBIB (unit) : 2015 = 15 2016 = 20 2017 = 20 2018 = 20 2019 = 20 2020 = 20 2021 = 20	Usaha perikanan budidaya yang mendapat sertifikat CBIB (unit) : 2016 = 895 2017 = 905 2018 = 915 2019 = 925 2020 = 935	-
3	Konsumsi ikan (kg/kap/thn) : 2015 = 32 2016 = 33 2017 = 34 2018 = 35 2019 = 36 2020 = 37 2021 = 38	Konsumsi ikan (kg/kap/thn) : 2016 = 35,16 2017 = 35,33 2018 = 35,5 2019 = 35,67 2020 = 35,84	Konsumsi ikan (kg/kap/thn) : 2015 = 40,90 2016 = 43,88 2017 = 47,12 2018 = 50,65 2019 = 54,49

4	Skor PPH : 2016 = 81,5 2017 = 82,0 2018 = 82,5 2019 = 83,0 2020 = 84,0 2021 = 85,0	Skor PPH : 2016 = 84,0 2017 = 84,6 2018 = 85,2 2019 = 85,8 2020 = 86,4 2021 = 87,0	Skor PPH ketersediaan : 2015 = 87,52 2016 = 89,71 2017 = 92,04 2018 = 94,25 2019 = 96,32
5	Jumlah ketersediaan pangan utama perkapita (kg/kap/thn): 2016 = 541,59 2017 = 554,13 2018 = 567,14 2019 = 580,64 2020 = 594,47 2021 = 608,65	Ketersediaan Pangan Utama (Beras) /ton : 2016 = 1.495.021 2017 = 1.558.079 2018 = 1.623.127 2019 = 1.690.253 2020 = 1.759.378 2021 = 1.831.128	-
6	Jumlah KK rawan pangan yang dibantu : 2016 = 100 kk 2017 = 100 kk 2018 = 100 kk 2019 = 100 kk 2020 = 100 kk 2021 = 100 kk	Teratasinya masyarakat rawan pangan (KK): 2016 = 86 kk 2017 = 106 kk 2018 = 110 kk 2019 = 110 kk 2020 = 110 kk 2021 = 110 kk	Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan: 2015= 1% 2016 = 1% 2017 = 1% 2018 = 1% 2019 = 1%
7	Fluktuasi harga pangan (beras) ditingkat konsumen (CV) : 2016 = 5,8% 2017 = <10% 2018 = <10% 2019 = <10% 2020 = <10% 2021 = <10%	Stabilnya harga pangan (gabah/beras) ditingkat konsumen : 2015= CV<5% 2016 = CV<5% 2017 = CV<5% 2018 = CV<5% 2019 = CV<5%	Stabilnya harga pangan (gabah/beras) ditingkat konsumen ; 2015= CV<5% 2016 = CV<5% 2017 = CV<5% 2018 = CV<5% 2019 = CV<5%
8	Konsumsi energy (Kkal/kap /hari) : 2016 = 2.000 2017 = 2.000 2018 = 2.000 2019 = 2.000 2020 = 2.000 2021 = 2.000	Konsumsi energy (Kkal/kap /hari) : 2016 = 2.000 2017 = 2.000 2018 = 2.000 2019 = 2.000 2020 = 2.000 2021 = 2.000	Konsumsi energy (Kkal/kap /hari) : 2015 = 2.004 2016 = 2.040 2017 = 2.077 2018 = 2.113 2019 = 2.150
9	Konsumsi protein (Gram/ kap /hari) 2016 = 52 2017 = 52 2018 = 52 2019 = 52 2020 = 52 2021 = 52	Konsumsi protein (Gram/ kap /hari) 2016 = 52 2017 = 52 2018 = 52 2019 = 52 2020 = 52 2021 = 52	Konsumsi protein (Gram/ kap /hari) 2015 = 56,1 2016 = 56,4 2017 = 56,6 2018 = 56,8 2019 = 57,0

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan, peluang, tantangan, strategi dan kebijakan pada renstra propinsi dan K/L terkait serta komparasi terhadap target capaian sasaran yang harus dicapai pada tahun 2016-2021 maka diperoleh faktor pendorong dari pelayanan Dinas

Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok yang mempengaruhi pelayanan Dinas yaitu:

1. Terdapat sinergitas antara Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Propinsi dengan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok.
2. Dukungan dana APBN dan APBD Propinsi yang cukup untuk pembangunan perikanan dan ketahanan pangan.

Sedangkan faktor penghambat yang ditemui pada pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok ditinjau dari kebijakan kementerian/lembaga dan propinsi adalah terbatasnya ketersediaan dana operasional dan pendamping pada APBD kabupaten untuk pendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan perikanan dan ketahanan pangan di Kabupaten Solok.

Berdasarkan kajian terhadap RPJMN, renstra kementerian tahun 2015-2019 serta Renstra Propinsi terdapat beberapa hal yang perlu dicapai dalam pembangunan perikanan dan ketahanan pangan di Kabupaten Solok yaitu :

1. Terwujudnya kedaulatan pangan melalui produksi pangan lokal.
2. Peningkatan konsumsi pangan dan ikan untuk kecukupan gizi masyarakat.
3. Peningkatan daya saing, nilai tambah dan pemasaran hasil produk sebagai antisipasi pasar bebas.
4. Tersedianya sarana prasarana perikanan dan pangan guna mendukung peningkatan dan pemasaran produk dan terwujudnya pembiayaan petani yang fleksibel dan sederhana.
5. Terwujudnya kawasan perikanan dalam meningkatkan ketersediaan bibit, keberlanjutan budidaya dan meningkatkan daya saing produk.
6. Terkendalinya hama dan penyakit ikan melalui peningkatan cara budidaya yang baik.
7. Terjaminnya mutu dan keamanan produk bahan asal pertanian dan ikan sesuai standar.
8. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.
9. Peningkatan SDM dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan dan pangan.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan perikanan dan kedaulatan pangan tidak terlepas dari ketersediaan lahan. Pemanfaatan lahan di Kabupaten Solok telah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Solok adalah untuk mewujudkan Kabupaten Solok sebagai sentra komoditas pertanian dan pengembangan sektor pariwisata yang ditunjang industri dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta diselaraskan dengan RTRWP dan RTRWN.

Salah satu kebijakan sekaitan dengan penataan ruang wilayah Kabupaten Solok adalah pengelolaan kawasan budidaya mendukung pengembangan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, pariwisata, dan industri dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Solok disusun strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Solok. Strategi yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan budidaya mendukung pengembangan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, pariwisata, dan industri dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup meliputi:

- a. Mengembangkan budidaya pertanian diarahkan untuk terjaganya daerah sebagai bagian dari lumbung padi provinsi dan nasional serta ketahanan pangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian;
- b. Mengembangkan kawasan peternakan diarahkan untuk tercapainya swasembada daging dan telur, guna pengembangan ekonomi produktif yang memiliki daya dukung tinggi terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah;
- c. Mengembangkan kawasan perikanan diarahkan untuk tercapainya kebutuhan protein, guna pengembangan ekonomi produktif yang memiliki daya dukung tinggi terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Solok terdiri atas kawasan lindung; dan kawasan budidaya. Didalam rencana pengembangan kawasan

budidaya, diatur suatu kawasan peruntukan pertanian terdiri atas: kawasan pertanian tanaman pangan; kawasan hortikultura; kawasan perkebunan; kawasan perikanan dan kawasan peternakan.

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas budidaya perikanan air tawar dan perikanan tangkap perairan danau. Kawasan peruntukkan budidaya perikanan air tawar dengan luas lebih kurang 10.182,5 hektar terdiri atas pengembangan kegiatan budidaya ikan di sawah; pengembangan kegiatan budidaya ikan karamba; serta pengembangan kegiatan budidaya ikan di kolam air deras; pengembangan kegiatan budidaya ikan di saluran irigasi. Kawasan peruntukkan perikanan tangkap perairan danau dengan luas lebih kurang 168,95 hektare merupakan kawasan peruntukkan kegiatan budidaya ikan keramba jaring apung (KJA).

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok tahun 2012–2031 permasalahan pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan perikanan dan pangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17. Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Pangan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rencana Kawasan Budidaya	1. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan 2. Belum adanya zonasi perairan umum danau	Pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok dan meningkatnya kebutuhan akan perumahan	Kebutuhan atas pangan yang bergizi dan beranekaragam yang semakin meningkat

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memberikan muatan substantif aspek lingkungan hidup yang berkelanjutan berupa sinergitas rencana dan program bagi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW) dan Renstra SKPD yang kemudian akan menjadi landasan RTRW dan Renstra SKPD.

KLHS menganalisis prediksi dampak rencana pembangunan terhadap lingkungan hidup untuk menyusun mitigasi dari kebijakan atau

memberikan alternatif kebijakan sehingga dampak lingkungan atau risiko yang diperkirakan akan terjadi dapat diminimalisir atau dihindari sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Solok tidak menimbulkan persoalan baru di masa yang akan datang dan dapat mengurangi potensi kerugian serta kehilangan manfaat pada saat kebijakan tersebut sudah diimplementasikan.

Berdasarkan analisis KLHS permasalahan pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan perikanan dan pangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18. Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan berdasarkan Analisis KLHS RPJMD Kabupaten Solok beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Pangan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembangunan perekonomian masyarakat secara terpadu berbasis teknologi dan pelestarian lingkungan	a. Alih fungsi lahan untuk perumahan dan lainnya b. Penggunaan sarana produksi dan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan belum optimal. c. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang menyebabkan punahnya biota asli perairan umum	1. Tingginya alih fungsi lahan. 2. Hama dan penyakit tanaman, ternak dan ikan masih berkembang. 3. Belum adanya aturan zonasi perairan umum 4. Belum adanya aturan yang jelas tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Perairan Umum Kabupaten Solok 5. Belum adanya aturan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan terutama bagan dengan mata jaring yang kecil yang sedang berkembang di Danau Singkarak	1. Ketersediaan sumber dayaperikanan dan pangan. 2. Kewenangan Dinas dalam pengembangan perikanan berkelanjutan dan peningkatan kedaulatan pangan. 3. Ketersediaan dukungan anggaran dari pusat dan propinsi serta perbankan 4. Ketersediaan Lembaga Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kab. Solok

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Dinas Perikanan dan Pangan dan berpengaruh dalam pelaksanaan pelayanan, maka muncul isu-isu strategis yang berkaitan dengan kondisi yang terjadi serta memiliki dampak bagi keberlanjutan pembangunan perikanan dan pangan dan perlu diatasi secara bertahap.

Isu-isu strategis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok sebagai berikut :

1. Penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan

Berkembangnya bagan di wilayah Danau Singkarak yang termasuk wilayah Kabupaten Solok dengan ukuran mata jaring yang sangat kecil berjumlah 232 unit dengan rincian : Nagari Kacang 33 unit, Nagari Tikalak 60 unit, Nagari Singkarak 36 unit, Nagari Saniangbaka 43 unit, Nagari Muaro Pingai 37 unit dan Nagari Paninggahan 23 unit. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Universitas Bung Hatta bekerja sama dengan Dinas Perikanan hasil tangkapan dari bagan terdiri dari 19,56% larva, 32,90% juvenil dan 47,33% ikan bilih dewasa. Artinya sebanyak 52,55% ikan yang tertangkap tidak memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan data tersebut tingkat keberlanjutan kelstarian ikan bilih sangat rendah (terancam).

2. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas benih dan induk ikan.

Untuk memenuhi kebutuhan benih ikan ini di Kabupaten Solok sudah dibangun Balai Benih Ikan (BBI) yang berlokasi di Nagari Sungai Janieh Kecamatan Gunung Talang dan instalasi yang berada di Nagari Koto baru Kecamatan Kubung. Namun BBI sendiri sampai saat ini belum berfungsi optimal sehingga masih perlu ditingkatkan untuk menunjang peningkatan produksi ikan air tawar. Di samping itu masyarakat Kabupaten Solok juga sudah dapat memproduksi benih sendiri melalui

Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang sudah berjumlah 38 unit. Namun untuk memenuhi permintaan akan benih dan induk ikan di Kabupaten Solok masih belum mencukupi dan masih didatangkan dari luar daerah.

3. Masih kurangnya diseminasi teknologi perikanan di tengah masyarakat
Secara umum usaha perikanan masih merupakan usaha sampingan di samping usaha utama masyarakat Kabupaten Solok yang merupakan petani. Usaha perikanan masih dilaksanakan secara tradisional dengan skala usaha yang masih kecil. Sedangkan untuk peningkatan nilai tambah baru beberapa masyarakat yang mampu melaksanakan teknologi pengolahan hasil perikanan yang memenuhi standar kelayakan produk.

4. Alih fungsi lahan ke non pertanian

Merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan ke non pertanian berdampak terhadap produksi bahan pangan masyarakat yang berasal dari sektor pertanian, perikanan dan peternakan, lingkungan fisik serta kesejahteraan masyarakat pertanian yang kehidupannya sangat tergantung pada lahan pertanian yang akhirnya akan mengganggu stabilitas ketahanan dan kedaulatan pangan masyarakat. Lahan pertanian Kabupaten Solok saat ini berdasarkan Database Pertanian tahun 2012 seluas 334.369 ha dan pada tahun 2016 menjadi seluas 334.055 ha.

5. Masih rendahnya mutu dan keamanan produk hasil perikanan dan pangan.

Tahun 2016 era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) resmi diberlakukan. Indonesia lebih bebas mengekspor barang dan jasa ke negara-negara anggota ASEAN. Sebaliknya, barang dan jasa dari negara-negara anggota ASEAN lebih bebas masuk ke Indonesia.

Bagi Indonesia, keberadaan MEA menjadi babak awal untuk mengembangkan berbagai kualitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara dalam perkembangan pasar bebas di akhir 2015. MEA menjadi dua sisi mata uang bagi Indonesia : satu sisi menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kualitas dan kuantitas produk dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia kepada negara-negara lain dengan terbuka, tetapi pada sisi yang lain dapat menjadi bumerang untuk Indonesia apabila Indonesia tidak dapat memanfaatkannya dengan baik.

Demikian juga halnya dengan produk perikanan dan pangan Kabupaten Solok.

Untuk menyiapkan sektor perikanan dan pangan menghadapi pasar tunggal ASEAN (MEA) diperlukan peningkatan nilai tambah terhadap komoditas andalan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan aman dikonsumsi, yang memiliki manfaat kompetitif sambil mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, informasi yang diperoleh tentang produk pesaing dari negara ASEAN lainnya yang masuk ke dalam negeri dapat direspon.

Peningkatan daya saing produk lokal sangat diperlukan menghadapi pasar bebas ASEAN 2015 mendatang, diantaranya: 1) meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas produksi, 2) menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing, 3) memperluas jaringan pemasaran, serta 4) meningkatkan kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk promosi pemasaran.

6. Masih adanya daerah rawan pangan di Kabupaten Solok

Saat ini di Kabupaten Solok masih terdapat daerah rawan pangan yang perlu difasilitasi dan ditanggulangi oleh pemerintah Kabupaten Solok melalui berbagai program dan kegiatan yang akan berdampak terhadap ketahanan pangan masyarakat setempat. Berdasarkan peta rawan pangan tahun 2015 terdapat 2 kecamatan yang masih merupakan daerah rawan pangan yang meliputi kecamatan Danau Kembar dan Kecamatan Junjung Sirih.

Kabupaten Solok merupakan salah satu daerah sentra pertanian dan perikanan mendukung upaya pemerintah pusat dalam pencapaian kedaulatan pangan dalam upaya pengentasan rawan pangan melalui program peningkatan produksi dan produktifitas produk pertanian dan perikanan yang berdaya saing dan berbasis kawasan.

7. Masih ditemukannya pangan yang tidak aman dikonsumsi masyarakat

Berdasarkan hasil pemeriksaan sampel yang setiap tahun dilakukan masih ditemukan adanya kandungan zat/residu yang berbahaya yang ditemukan pangan segar yang dijual masyarakat dan demikian juga halnya dengan pangan olahan.

Teknik bercocok tanam yang banyak digunakan saat ini oleh petani di Kabupaten Solok adalah teknik budidaya yang banyak memanfaatkan

zat kimia buatan seperti pupuk buatan, insektisida, fungisida, herbisida, pestisida dan zat lainnya yang mendukung produksi tanaman pangan dan hortikultura. Pemanfaatan zat kimia buatan tersebut mampu merusak keseimbangan ekosistem dan mengganggu kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. Hal tersebut mengganggu tujuan penyediaan pangan yang memenuhi persyaratan keamanan bagi konsumsi masyarakat serta tujuan melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber pangan nasional.

Di samping teknik budidaya produksi, bahan pangan yang beredar di pasar perlu diawasi karena adanya sebagian oknum pedagang dan produsen menambahkan zat kimia yang tidak aman dikonsumsi oleh manusia ke dalam bahan pangan tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa, tampilan, dan umur penyimpanan. Rendahnya pengawasan terhadap peredaran bahan pangan yang beredar menghambat terpenuhinya tujuan penyediaan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat.

8. Masih rendahnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan ditentukan oleh skor pola pangan harapan (PPH). Untuk Kabupaten Solok skor PPH masih rendah yang disebabkan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, seimbang dan aman, kebiasaan konsumsi beras/nasi sebagai pangan pokok yang wajib dimakan setiap jadwal makan serta berkembangnya industri pangan yang siap saji.

9. Fluktuasi harga pangan pokok strategis

Fluktuasi harga pangan dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan, sifat produksi yang musiman dan tidak merata antar musim, dan buruknya infrastruktur yang berkonsekuensi terhadap ongkos angkut yang tinggi, serta meningkatnya frekuensi bencana alam. Hal ini mengakibatkan aksesibilitas masyarakat secara ekonomi menurun sehingga kondisi ketahanan pangan terganggu. Tahun 2015 persentase fluktuasi harga pangan pokok strategis masih cukup tinggi yakni sebesar 30,70%.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok disusunlah Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahunan yaitu 2016–2021 dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala dan perubahan-perubahan di lingkungan organisasi yang terjadi. Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok mencakup tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan isi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara teratur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka lima tahun ke depan

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dari Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok adalah :

1. Meningkatkan pendapatan pelaku utama perikanan
2. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, keamanan dan keanekaragaman pangan masyarakat

Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan maka Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok telah merumuskan sasaran yaitu:

1. Meningkatnya produksi perikanan
2. Meningkatnya daya saing usaha perikanan
3. Terjaganya ketersediaan pangan
4. Terkendalinya harga pangan utama di pasaran
5. Tersedianya bahan pangan segar yang aman dikonsumsi masyarakat
6. Peningkatan diversifikasi pangan

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok 2016-2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan pendapatan pelaku utama perikanan	Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor perikanan		Peningkatan produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan (ton)	4.223	4.935	5.850	6.965	7.335	7.702
				Meningkatnya daya saing usaha perikanan	Persentase peningkatan jumlah pelaku utama yang menerapkan standar kelayakan usaha perikanan (%)	187,50	91,30	47,70	32,30	24,40	19,60
3	Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, keamanan dan keanekaragaman pangan masyarakat	Ketersediaan pangan utama perkapita (kg/kap/thn)	608,65	Terjaganya ketersediaan pangan	Ketersediaan pangan utama perkapita (kg/kap/thn)	541,59	554,13	567,14	580,64	594,47	608,65
		Fluktuasi harga pangan ditingkat konsumen (Coefisien Variasi) (%)	<10	Terkendalinya harga pangan utama di pasaran	Fluktuasi harga pangan ditingkat konsumen (Coefisien Variasi) (%)	5,80	5,90	5,89	5,88	5,87	5,86
		Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat (%)	90	Tersedianya bahan pangan segar yang aman dikonsumsi masyarakat	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat (%)	90	90	90	90	90	90
		Skor Pola Pangan Harapan (skor PPH)	85,00	Peningkatan diversifikasi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (skor PPH)	81,50	82,00	82,50	83,00	84,00	85,00

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan pembangunan perikanan dan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Pangan berdasarkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok tahun 2016-2021 sebagai berikut :

VISI : <i>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok yang Maju Menuju Kehidupan Masyarakat Madani dalam Nuansa Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah</i>			
MISI III : Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan infrasarana infrastruktur yang memadai			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan pendapatan pelaku utama perikanan	1.1. Meningkatnya produksi perikanan	1.1. Penggunaan induk unggul dan benih unggul dalam usaha perikanan	1.1. Penyediaan benih ikan unggul
			1.2. Penyediaan induk unggul bagi Unit Pembenihan Rakyat
		1.2. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan yang memadai	2.1. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana perikanan
		1.3. Peningkatan penerapan teknologi tepat guna	3.1. Diseminasi teknologi perikanan bagi masyarakat
		1.4. Penyediaan sarana penangkapan bagi masyarakat nelayan	4.1. Fasilitasi alat tangkap yang ramah lingkungan
		1.5. Menumbuh kembangkan kelompok nelayan dan pembudidaya ikan	5.1. Penyusunan Regulasi perikanan
			5.2. Penataan kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan
		1.6. Pemanfaatan IPTEK bagi usaha dan pengembangan perikanan	6.1. Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan industri-industri yang bergerak di

			bidang perikanan
			6.2. Pengembangan Teknologi Budidaya Perikanan dalam Masyarakat
		1.7. Pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan	7.1. Fasilitasi sarana prasarana pengolahan hasil perikanan
		1.8. Peningkatan SDM pelaku utama perikanan	8.1. Pelatihan penerapan teknologi perikanan tepat guna
			8.2. Meningkatkan kemampuan/ kualitas SDM pelaku usaha sehingga memiliki jiwa enterpreneurship yang handal dalam pelaksanaan usaha serta memiliki daya saing
	1.2. Meningkatnya daya saing usaha perikanan	2.1. Penerapan Cara Pembenihan Ikan yg Baik (CPIB)& Cara Budidaya Ikan yg Baik (CBIB)	1.1. Sertifikasi UPR dan pokdakan
		2.2. Memberikan kemudahan permodalan bagi pembudidaya dan pengolah hasil perikanan	2.1. Fasilitasi kemitraan investasi dibidang perikanan
			2.2. Fasilitasi pengembangan lembaga pembiayaan usaha perikanan
		2.3. Meningkatkan kualitas produk olahan hasil perikanan	3.1. Standarisasi produk olahan hasil perikanan (Standar Kelayakan Pengolahan)
2. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, keamanan dan keanekaragaman pangan masyarakat	2.1. Terjaganya Ketersediaan pangan	1.1. Penyediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	1.1. Menyediakan cadangan pangan dan meningkatkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah

			1.2. Adanya regulasi tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah
		1.2. Penumbuhan dan pengembangan desa mandiri pangan	2.1. Advokasi dan pemberian stimulus bagi kelompok keluarga miskin (afinitas)
		1.3. Mengoptimalkan fungsi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten	3.1. Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah
	2.2. Terkendalinya harga pangan utama di pasaran	2.1. Menjaga stabilitas harga pangan ditingkat konsumen	1.1. Penetapan harga pangan oleh pemerintah
			1.2. Memperpendek rantai pemasaran hasil pangan melalui lembaga distribusi pangan di setiap wilayah
		2.2. Mendorong peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, stabilisasi harga dan akses pangan	2.1. Menumbuh kembangkan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
		2.3. Tersedianya infrastruktur yang memadai	3.1. Membangun infrastruktur yang terjangkau ke seluruh wilayah
	2.3. Tersedianya pangan segar yang aman dikonsumsi masyarakat	3.1. Peningkatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	1.1. Meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar dan olahan
			1.2. Sertifikasi produk pangan segar dan olahan
		3.2. Penyediaan sumberdaya manusia yang berkompetensi dibidang pengawasan mutu dan keamanan pangan	2.1. Meningkatkan SDM petugas pengawas mutu dan keamanan pangan

		3.3. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan pada masyarakat	3.1. Sosialisasi keamanan pangan segar dan olahan
	2.4. Peningkatan diversifikasi pangan	4.1. Penumbuhan, percepatan dan penganekaragaman konsumsi pangan	1.1. Fasilitasi sarana dan prasarana untuk pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan bergizi
			1.2. Pengembangan dan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal
		4.2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman	2.1. Penumbuhan kader pangan di tiap nagari
			2.2. Pemberdayaan kelompok wanita dalam diversifikasi pangan
		4.3. Mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	3.1. Penumbuhan demplot pemanfaatan pekarangan di setiap nagari
		4.4. Penganeka ragam produk olahan hasil perikanan	4.1. Melaksanakan dan mengikuti Lomba Cipta Menu Olahan Pangan Lokal

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Program

Rencana program untuk tahun 2016–2021 dalam rangka pembangunan perikanan dan ketahanan pangan Kabupaten Solok, akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok serta sesuai dengan misi Bupati dan Wakil Bupati Solok Periode 2016-2021 yaitu Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat Kabupaten Solok yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai. Dalam mewujudkan strategi dan kebijakan tersebut di atas yaitu untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil perikanan dan peningkatan ketersediaan, akses dan keamanan pangan akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pada program pembangunan daerah sebagai berikut:

Secara rinci program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Pangan tahun 2016-2021 sebagai berikut

I. Program Pendukung

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat menyurat
2. Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
3. Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
9. Penyediaan peralatan rumah tangga
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12. Penyediaan jasa pendukung administrasi keamanan teknis perkantoran
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
14. Pelayanan administrasi perkantoran

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
 - 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - 3. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
 - 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
 - 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin aparatur
 - 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- d. Program Peningkatan Pengembangan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 2. penyusunan laporan keuangan semester
 - 3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
 - 4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - 5. Penyusunan dan pengembangan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
 - 6. Penyusunan Laporan AKIP SKPD
 - 7. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- e. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - 1. Peningkatan Sumber daya Aparatur

II. Program Utama

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
 - 1. Penanganan Daerah Rawan Pangan
 - 2. Penyusunan Database Ketahanan Pangan
 - 3. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
 - 4. Pengembangan Lumbung Pangan Desa
 - 5. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
 - 6. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
 - 7. Pengembangan Diversifikasi Tanaman
 - 8. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
 - 9. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
 - 10. Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
 - 11. Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering
- b. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
 - 1. Pengembangan Bibit Ikan Unggul

2. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
3. Sarana dan Prasarana Pembibitan Ikan
4. Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
5. Pengendalian Kesehatan Lingkungan Budidaya Perikanan
- c. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
 1. Peningkatan pengembangan dan pengawasan sumberdaya perikanan perairan umum
- d. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
 1. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
 2. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
 3. Gerakan Gemar Makan Ikan
 4. Promosi Atas Hasil Produksi Perikanan dan Pangan Unggulan Daerah
 5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan

Dalam mendukung terwujudnya RPJMD 2016–2021 Kabupaten Solok, program nasional yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Program Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional adalah program Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Sedangkan program pusat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dapat mendukung pengembangan perikanan di Kabupaten Solok yaitu:

1. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap
2. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya
3. Program Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
4. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

5.2. Rencana Kegiatan

Dalam mewujudkan strategis dan kebijakan tersebut di atas yaitu untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil perikanan dan peningkatan ketersediaan, akses dan keamanan pangan akan

dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pada program pembangunan daerah sebagai berikut:

A. Kegiatan Program Daerah:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

- a. Penanganan Daerah Rawan Pangan
- b. Penyusunan Database Ketahanan Pangan
- c. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
- d. Pengembangan Lumbung Pangan Desa
- e. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
- f. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
- g. Pengembangan Diversifikasi Tanaman
- h. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
- i. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
- j. Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
- k. Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, dengan kegiatan :

- a. Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
- b. Pengembangan Bibit Ikan Unggul
- c. Pengadaan Sarana dan Prasana
- d. Pembinaan dan pengembangan perikanan
- e. Pengendalian Kesehatan Lingkungan Budidaya Perikanan

2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

- a. Peningkatan Pengembangan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan Perairan Umum

3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

- a. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
- b. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
- c. Gerakan gemar makan ikan
- d. Promosi Atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah
- e. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan

a. Indikator Kinerja

Tolok ukur kinerja pembangunan Kabupaten Solok khusus bidang perikanan dan ketahanan pangan selama periode waktu 2016–2021, dinilai dari indikator kinerja pembangunan perikanan dan ketahanan pangan. Indikator kinerja tersebut merupakan implementasi dari target indikator kinerja dan capaian kondisi awal dan akhir yang ada pada RPJMD Kabupaten Solok. Indikator Kinerja pembangunan bidang urusan perikanan dan ketahanan pangan

berdasarkan kondisi awal dan akhir yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Perikanan dan Pangan Berdasarkan Kondisi Awal Tahun 2015 dan Capaian Akhir Tahun 2021

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja			Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
		Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7
Misi 3 : Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi Masyarakat yang Lebih Luas, didukung oleh Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Memadai						
1	Jumlah produksi perikanan	ton	3.405,12	7.702	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Pilihan Kelautan dan Perikanan
					Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pilihan Kelautan dan Perikanan
2	Persentase peningkatan jumlah pelaku utama yang menerapkan standar kelayakan usaha perikanan	%	N/A	19,60	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pilihan Kelautan dan Perikanan
3	Ketersediaan pangan utama perkapita	Kg/kap/thn	435,43	608,65	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Wajib Ketahanan Pangan
4	Fluktuasi harga pangan ditingkat konsumen (Voefisien Variasi/CV)	%	6,9	5,86	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Wajib Ketahanan Pangan
5	Persentase bahan pangan segar yang aman dikonsumsi masyarakat	%	N/A	90,00	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Wajib Ketahanan Pangan
6	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai Skor	80,01	85,00	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Wajib Ketahanan Pangan

b. Kelompok Sasaran

Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan faktor penentu pembangunan perikanan dan ketahanan pangan. Tercapainya pembangunan perlu ditentukan kelompok sasaran berdasarkan kawasan/wilayah/lokasi, SDA, SDM dan komoditas sumberdaya.

Pelaksanaan pembangunan perikanan di Kabupaten Solok diarahkan pada kawasan pengembangan komoditi unggulan sebagai berikut:

- Budidaya Perikanan air tawar di sawah (semua kecamatan kecuali Danau Kembar).
- Kawasan budidaya ikan karamba meliputi seluruh kecamatan kecuali Kecamatan X Koto Singkarak.

- Kawasan budidaya ikan di kolam air deras meliputi kecamatan X Koto Singkarak, Gunung Talang, Bukit Sundi, Kubung dan X Koto Diatas.
- Kawasan budidaya ikan di saluran irigasi meliputi Kecamatan Junjung Sirih, X Koto Singkarak, Lembang Jaya, Bukit Sundi, Gunung Talang, Kubung, Payung Sekaki, Pantai Cermin, Lembah Gumanti, Hiliran Gumanti dan IX Koto Sei. Lasi.
- Kawasan peruntukkan perikanan tangkap perairan danau meliputi Kecamatan Koto Singkarak, Lembah Gumanti, Junjung Sirih dan Danau Kembar
- Kawasan peruntukkan kegiatan budidaya ikan keramba jaring apung (KJA).

Kelompok sasaran peningkatan produksi perikanan ditujukan pada kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), kelompok nelayan, kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) dan kelompok pengolah hasil perikanan (poklahsar) yang ada di Kabupaten Solok. Kelompok sasaran dalam peningkatan ketahanan pangan adalah kelompok dasa wisma (kelompok wanita), kelompok tani, gabungan kelompok tani (LDPM) dan KK miskin.

c. Rencana Pendanaan Indikatif

Kegiatan pembangunan perikanan dan ketahanan di Kabupaten Solok ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memfasilitasi sebesar-besarnya partisipasi masyarakat dengan mendayagunakan keterpaduan kegiatan yang dibiayai oleh APBN, APBD, Swasta dan sumber-sumber dana pembangunan lainnya.

Implementasi pembangunan perlu adanya dukungan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok guna tercapainya program pembangunan selama kurun waktu 2016–2021 sebagai berikut:

Tabel 20. Rencana Pendanaan Indikatif Kegiatan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021

No	Tahun	Rencana APBD (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1	2016	5.729.002.000	
2	2017	8.143.507.000	42,15
3	2018	6.848.132.000	(15,91)
4	2019	7.453.910.000	08,85
5	2020	10.551.139.000	41,55
6	2021	11.551.139.000	09,48
Jumlah / Rata-rata		50.276.829.000	17,22

Pada tabel rencana pendanaan indikatif kegiatan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 terlihat bahwa rata-rata

pendanaan dari dana yang bersumber dari APBD berjumlah Rp. 50.276.829.000,- atau tumbuh sebesar 17,22%.

a. **Program dan Kegiatan**

Program dan anggaran kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Pangan selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu tahun 2016-2021 dengan rincian program dan kegiatan serta pendanaan sebagai berikut :

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (per 31 Des 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
						Target	Rp Rp (000)	Target	Rp Rp (000)	Target	Rp Rp (000)	Target	Rp Rp (000)	Target	Rp Rp (000)	Target	Rp Rp (000)		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Meningkatkan pendapatan pelaku utama perikanan			Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor perikanan															Dinas Perikanan dan pangan
		Peningkatan produksi perikanan		Jumlah produksi perikanan (ton)	3.405,12	4.223		4.935		5.850		6.965		7.335		7.702		37.010	
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	2.998,42	3.776	1.302.701	4.456	2.501.472	5.347	2.023.086	6.417	9.955.819	6.738	11.449.192	7.075	13.166.571	33.809	
			Keg. Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah penyediaan calon induk ikan unggul di masy. (jenis)	jenis	-	-	-	-	3	415.010	3	540.000	3	950.000	3	1.000.000	3	
				Jumlah pengadaan Benih Ikan (paket)	1 paket	-	-	-	-	1		1		1		1		4	
				Jumlah pengadaan pakan Ikan (paket)	1 paket	-	-	-	-	1		1		1		1		4	
			Keg. Sarana dan Prasarana Pembibitan Ikan	Jumlah pengembangan unit sarana dan prasarana BBI (paket)	-	-	-	3	2.067.122	3	1.232.901	3	1.250.000	3	2.000.000	3	2.200.000	15	
				Persentase pelaksanaan	-	-	-	100		100		100		100		100		100	

			operasional BBI (%)														
			Jumlah pengembangan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan dan UPR (paket)	-	-		1		1		1		1		1		5
			Jumlah jalan produksi perikanan yang dibangun (ruas)	1	-		-		1		1		1		1		4
		<i>Keg. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan</i>	Jumlah penyediaan calon induk ikan unggul di masy. (jenis)		2	1.092.440	2	434.350	-	17.300	-	250.000	-	155.570	-	160.000	2
			Jumlah pengembangan unit sarana dan prasarana BBI (paket)		2		0		0		0		0		0		2
			Jumlah pengembangan sarana prasarana UPR (unit UPR)		2		0		0		0		0		0		2
			Jumlah pengadaan Benih Ikan dan Pakan (paket)	1 paket	2		-		0		0		0		0		2
			Jumlah kelompok yang dibina	-	-		-		50		50		50		50		50
			Jumlah aparatur perikanan yg mengikuti pelatihan/ magang	-	1		-		2		2		2		2		9

			Jumlah Sosialisasi perda ttg perikanan	-	-	-	-	14 kec	-	-	-	-	-	-	14 kec		
		Keg. Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	Jumlah pengembangan dan fasilitasi mina padi di Kab. Solok (ha)	-	-	193.863	-	-	20	357.875	5	800.000	5	750.000	5	800.000	35
			Persentase peningkatan kelompok pembudidaya ikan yg terbina & terfasilitasi (%)	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
			Jumlah pengembangan dan fasilitasi kolam air tenang (paket)	-	-	-	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	80
			Jumlah pengembangan budidaya ikan karamba/kja (paket)	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	3
			Jumlah pengembangan budidaya Lele/budidaya dgn Teknologi Bio Flug (paket)	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8
		Keg. Pengendalian Kesehatan Lingkungan Budidaya Perikanan	Terlaksananya pemeriksaan sampel dan pengendalian penyakit ikan dan lingkungannya	-	1 thn	16.398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah prod perikanan perairan umum	406,7	447	469.969	479	227.200	503	907.263	548	1.000.000	597	600.000	627	1.000.000	3.201
		<i>Keg. Peningkatan pengembangan dan pengawasan sumberdaya perikanan perairan umum</i>	Jumlah lubuk larangan yang difasilitasi dgn bantuan ikan dan pakan serta plank papan nama (kelp)	-	5	469.969	20	227.200	20	907.263	20	1.000.000	20	600.000	20	1.000.000	105
			Jumlah kelompok nelayan/pok maswas yang terfasilitasi sarana prasarannya (sarana tangkap spt jaring, perahu, mesin tempel dll)	-	3		1		5		5		5		5		24
			Reservaat (unit)	1	-		1		1		1		1		1		5
		Meningkatnya daya saing usaha perikanan	Persentase peningkatan jumlah pelaku utama yang menerapkan standar kelayakan usaha perikanan	-	187,5		91,3		47,7		32,3		24,4		19,6		19,6
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah konsumsi ikan perkapita pertahun	31,2	32,0	1.311.783	33,0	2.010.029	34,0	298.038	35,0	2.300.100	36,0	2.484.580	37,0	2.710.939	37,0
			Jumlah pelaku utama perikanan yang	8 org	15		21		21		21		21		21		120

				mendapatkan sertifikasi mutu hasil perikanan (CBIB/CPIB)															
			<i>Keg. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis</i>	Jumlah kelompok yg dibina dalam pengolahan hasil perikanan (poklahsar)	-	-	-	-	832.270	3	36.844	3	55.000	3	150.000	3	200.000	15	
				Jumlah poklahsar yang difasilitasi sarana dan prasarannya	-	-	-			2		2		2		2		10	
				Pelatihan/pe magangan pangan olahan bagi pelaku usaha/kelompok agribisnis	7 orang	8		-		6		6		6		6		32	
				Penyusunan Perda ttg Perikanan Kab. Solok (ranperda/perda)	-	-		1		-		-		-		-		1	
				Jumlah kelompok yang difasilitasi sarana kemasan produk (kelp)	-	-		-		1		1		1		1		4	
				Sertifikasi produk (paket)	-	-		1		2		1		1		1		6	
				Jumlah bangsal pengolahan yg dibangun (unit)	1 unit	1		1		1		1		1		1		6	

				Jumlah pasar ikan yg dibangun (unit)	1 unit	1	-	1	1	1	1	1	1	1	5			
			<i>Keg. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan</i>	Jumlah kelp yang dibina dalam pengolahan hasil perikanan (poklhasar)		13	995.684	-	326.897	-	-	-	-	-	-	13		
			<i>Keg. Promosi Atas Hasil Produksi Perikanan dan Pangan Unggulan Daerah</i>	Jumlah promosi atas hasil perikanan dan pangan unggulan daerah yang diikuti dan dilaksanakan (kali)	-	6	92.000	6	247.612	6	91.394	6	150.000	6	555.450	6	638.768	36
			<i>Keg. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis</i>	Jumlah pembudidaya ikan yang dilatih CBIB/CPIB	-	-	-	30	461.800	30	28.550	30	30.000	30	150.000	30	200.000	150
				Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang didampingi dan dibina	-	-		2		2		2		2		2		10
				Jumlah kelompok yg difasilitasi dalam pengembangan budidaya perikanan dan perbenihan	-	-		2		2		2		2		2		10
				Jumlah pembenih yang dilatih (dimagangkan)/org	-	-		5		5		5		5		5		25

			<i>Keg. Gerakan Gemar Makan Ikan</i>	Jumlah kelembagaan yang menerapkan makan serba ikan (PAUD, PKK, Kec, Forikan) (lembaga)	17	17	224.098	17	141.450	17	141.250	17	350.000	17	465.850	17	535.728	17	
				Jumlah Sosialisasi gemar makan ikan (kec)	14 kec	14		14		14		14		14		14		14	
2	Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, keamanan dan keanekaragaman pangan masyarakat	Terjaganya Ketersediaan pangan utama		Ketersediaan pangan perkapita (kg/kap/thn)	435,43	541,59		554,13		567,14		580,64		594,47		608,65		608,65	Dinas Perikanan dan Pangan
		Tersedianya pangan segar yang aman dikonsumsi masyarakat		Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat	N/A	90		90		90		90		90		90		90	
		Terkendalinya harga pangan utama di pasaran		Fluktuasi harga pangan di tingkat konsumen (Coevisien Variasi/CV)	6,90	5,80		5,90		5,89		5,88		5,87		5,86		5,86	
		Peningkatan diversifikasi pangan		Skor Pola Pangan Harapan /PPH (angka/skor)	80,01	81,5		82,0		82,5		83,0		84,0		85,0		85,0	
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah ketersediaan pangan perkapita	435,43	541,59	1.871.476	554,13	2.500.000	567,14	1.015.589	580,64	4.574.100	594,47	4.902.455	608,65	5.372.954	608,65	

				(kg/kap/thn)														
			<i>Keg. Penanganan Daerah rawan Pangan</i>	Jumlah pengisian lumbung pangan pemerintah (ton)	10 ton	-	21.025	10	528.441	10	351.329	10	350.000	10	264.600	10	352.200	50
				Penyusunan neraca bahan makanan (laporan)	1 laporan	1		1		1		1		1		1		6
				Penyusunan Peta Kerawanan Pangan (PSVA) (laporan)	1 laporan	1		1		1		1		1		1		6
				Penyusunan Skor PPH (laporan)	1 laporan	1		1		1		1		1		1		6
				Penyusunan analisis SKPG (laporan)	1 laporan	1		1		1		1		1		1		6
				Jumlah paket Bantuan bahan pangan	1 paket	1		1		1		1		1		1		6
			<i>Keg. Penyusunan Database Ketahanan Pangan</i>	Jumlah database yang disusun (dokumen)	1 dokumen	1	19.135	-	-									
			<i>Keg. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah</i>	Jumlah penyediaan cadangan Pangan Daerah (ton)	-	10	128.875	-	-		-		-		-			
			<i>Keg. Pengembangan Lumbung Pangan Desa</i>	Jumlah lumbung pangan yang dibangun (unit)	7 Unit	4	508.853	-	-	2	77.600	2	50.000	2	750.000	2	800.000	8
				Jumlah pengisian lumbung pangan masy.(ton)	24 ton	-		-		10		10		10		10		40

				Jumlah pembinaan kelompok lumbung pangan	-	2	250.000	22		22		22		22		22		22
			<i>Keg. Pengembangan Desa Mandiri Pangan</i>	Jumlah kk miskin yang dibantu/difasilitasi untuk lebih produktif dalam memanfaatkan waktu dan lahan yg ada (tanaman, ternak dan ikan) / kk	20 kk	-	-	25	596.204	25	30.660	25	500.000	25	330.750	25	347.288	125
				Jumlah kader pangan yang mengikuti pelatihan	-	-	-	-		28		28		28		28		96
			<i>Keg. Pengembangan Pertanian Lahan Kering</i>	Jumlah kelompok masy.yang difasilitasi dalam upaya peningkatan produktifitas lahan yang ada (kelp)	-	-	-	12	216.001	12,00	556.000	-	-	12,00	385.875	12,00	405.169	60
				Jumlah kelompok yg meningkat pengetahuannya dalam pemanfaatan lahan guna penanggulangan masalah rawan pangan (kelp)	-	-	-	1		12		12	-	12	-	12	-	49

		Tersedianya pangan segar yang aman dikonsumsi masyarakat	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat	N/A	90		90	95.700	90	38.644	90		90		90		90
			<i>Keg. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan</i>	Persentase fasilitasi tim keamanan terpadu (thn)	100%	100	66.945	100	95.700	100	38.644	100	80.000	100	250.000	100	300.000	600
				Jumlah pemeriksaan sampel pangan (sampel)	10 sampel	15		20		20		20		20		20		115
				Jumlah pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar dan olahan (kali)	12 kali	12		12		12		12		12		12		72
				Jumlah pelaksanaan Rakor Dewan Ketahanan Pangan (kali)	1 kali	1		1		2		2		2		2		9
				Jumlah pengadaan mobil keliling pengawasan bahan makanan dan kelengkapannya (unit)	-	-		-		1		-		-		-		1
				Jumlah petugas yang dilatih dalam pemeriksaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan (org)	-	-		-		2		2		-		-		2

				Jumlah pengembangan aplikasi E-Pangan (dibangun dan dikembangkan)	-	-	-	-	-	1	1	-	2					
		Terkendalinya harga pangan utama di pasaran	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Fluktuasi harga pangan di tingkat konsumen (Coevisien Variasi/CV)	6,9	5,8	<10	31.450	<10	16.544	<10	<10	<10					
			<i>Keg. Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat</i>	Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang Dibina (gapoktan /kelp)	-	2	250.000	15	31.450	15	16.544	15	40.000	15	250.000	15	300.000	15
				Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masy. yang ditumbuhkan / difasilitasi (gapoktan)	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	
				Jumlah Toko Tani Indonesia yg dibentuk	-	1	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	8	
				Jumlah kecamatan yang dipantau harga pangan pokok ditingkat produsen dan konsumen (kec)	6 kec	6	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	

		Peningkatan diversifikasi pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan /PPH (angka/skor)	80,01	81,5		82,0	1.443.503	82,5	1.117.194	83,0		84,0		85,0		85,0
			<i>Keg. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan</i>	Jumlah kelompok yg difasilitasi dalam pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan yg beragam guna penganeekaragaman konsumsi pangan masy. (tanaman, ternak, ikan)	27 kelp	31	459.900	20	530.828	20	377.975	-	-	20	610.785	20	641.324	131
			<i>Keg. Pengembangan Diversifikasi Pangan</i>	Jumlah kelompok yg difasilitasi dalam penyediaan tanaman pangan yang beragam di tingkat rumah tangga	7 Kelp	8	-	8	197.150	8	309.075	8,00	400.000	8,00	441.000	8,00	463.050	40
			<i>Keg. Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)</i>	<i>Persentase penyediaan bahan pangan yang beragam ditingkat rumah tangga (olahan pangan) / KRPL</i>	7 KRPL	11,00	416.743	12	715.525	12	430.144	12	450.000	12	220.500	12	231.525	60
				Jumlah Lomba cipta menu tingkat kab dan prop yang dilaksanakan	-	-		-		2		2		2		2		8

				dan diikuti (kali)														
				Jumlah kader pangan yang mengikuti pelatihan (org)	-	-	-	28	28	-	28	-	28	-	28		112	
				Jumlah lomba pengolahan pangan lokal	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	1 kali	-	1 kali		2	
3	Mewujudkan kualitas Pelayanan administrasi dan pelaporan kinerja	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja		Nilai Evaluasi AKIP	N/A	N/A	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi perkantoran	NA	NA	294.177	2,9	339.472	3,0	1.148.001	3,1	557.382	3,2	607.684	3,3	667.211	3,3
			Keg. penyediaan Jasa Surat menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat	100%	100%	-	100%	853	100%	1.800	100%	1.100	100%	1.210	1	1.331	100
			Keg. Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi sd air dan listrik	100%	100%	-	100%	34.767	100%	33.541	100%	96.800	100%	106.480	1	117.128	100
			Keg. Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Persentase penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/ operasional	100%	100%	-	100%	6.800	100%	7.000	100%	12.100	100%	13.310	1	14.641	100
			Keg. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	100%	-	100%	13.476	100%	15.450	100%	18.150	100%	19.965	1	21.962	100

		Keg. penyedia an alat tulis kantor	Persentase penyediaan alat tulis kantor	100%	100%	-	100%	31.639	100%	74.956	100%	75.000	100%	46.585	1	51.244	100
		Keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	-	100%	17.400	100%	30.000	100%	24.200	100%	26.620	1	29.282	100
		Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	100%	-	100%	2.200	100%	3.500	100%	3.500	100%	2.928	1	3.221	100
		Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	-	-	-	100%	72.500	100%	20.000	100	50.000	100	55.000	100
		Keg. Penyediaan peralatan rumah tangga	Persentase penyediaan peralatan rumah tangga	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Keg. Penyediaan makanan dan minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman	100%	100%	-	100%	26.000	100%	28.350	100%	37.510	100	41.261	100	45.387	100
		Keg. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	Persentase penyediaan keikutsertaan dalam rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	100%	100%	-	100%	91.187	100%	372.750	100%	380.000	100	390.000	100	400.000	100
		Keg. Penyediaan jasa pendukung administrasi keamanan teknis perkantoran	Persentase penyediaan jasa pendukung administrasi keamanan teknis perkantoran	100%	100%	-	100%	56.520	100%	145.296	100%	-	-	-	-	-	-
		Keg. rapat-rapat	Persentase keikutsertaan	100%	100	-	100	58.629	100	362.857	100	150.000	100	160.000	100	170.000	100

		koordinasi dan konsultasi dalam daerah	dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah															
		Keg. Pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100	294.177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan disiplin aparatur (%)	100%	100	-	100	-	100	30.000	100	30.000	100	33.000	100	36.000	100	
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Persentase penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (stel)	100%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	36.000	60	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang mempunyai kondisi baik	NA	NA	182.088	NA	112.824	95	347.116	95	155.000	95	174.100	100	194.410	100	
		Keg. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	100%	100	-	1	108.824	100	251.116	1	121.000	100	133.100	100	146.410	100	
		Keg. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase pemeliharaan gedung kantor	100%	100	-	-	-	100	11.000	1	20.000	100	25.000	100	30.000	100	
		keg. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehab sedang/berat gedung kantor (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		Keg. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan	Persentase pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	100%	100	-	1	4.000	100	11.000	1	14.000	100%	16.000	100%	18.000	100	

		<i>perlengkapan kantor</i>	kantor (thn)															
		<i>Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (thn)	100%	100	182.088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
		Program Peningkatan Pengembangan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	NA	NA	26.009	B	41.212	B	10.658	BB	58.300	BB	66.300	BB	76.335	BB	
		<i>Keg. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan)	1 lap	-	-	1	2.200	1	800	1	130.000	1	135.000	1	140.000	5	
		<i>Keg. penyusunan laporan keuangan semester</i>	Jumlah laporan keuangan semester (laporan)	-	-	-	1	1.190	-	-	1	2.750	1	3.000	1	3.500	5	
		<i>Keg. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran</i>	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran (laporan)	-	-	-	1	1.000	1	200	1	1.300	1	1.400	1	1.500	5	
		<i>Keg. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (laporan)	-	-	-	1	1.500	1	300	1	2.750	1	3.000	1	3.500	5	
		<i>Keg. Penyusunan dan pengembangan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen</i>	Jumlah dokumen data/informasi yang disusun (laporan)	-	1	16.954	4	33.822	4	8.758	4	46.000	4	52.900	4	60.835	21	

		<i>perencanaan</i>																
		<i>Keg.Penyusunan Laporan AKIP SKPD</i>	Jumlah laporan AKIP SKPD (laporan)	-	-	-	1	1.500	1	600	1	2.750	1	3.000	4	3.500		
		<i>Keg. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	5 lap	5	9.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
		Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase aparatur pemerintah yang mengikuti peningkatan SDM %)	16,47	12,66	20.800	-	-	-	-	15	35.000	15	40.000	15	40.000	15	
		<i>Keg.Peningkatan Sumber daya Aparatur</i>	Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan SDM (org)	14	10	20.800	-	-	-	-	-	-	10	40.000	10	40.000	10	
	Total					5.729.002		8.143.507		6.848.132		7.453.910		10.551.139		11.967.493		50.276.829
	Persentase dari total					11,39		16,20		13,62		14,83		20,99		45,95		
	Pertumbuhan							42,15		(15,91)		08,85		41,55		09,48		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok dijabarkan melalui indikator kinerja utama Dinas Perikanan dan Pangan. Indikator kinerja utama bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sektor perikanan dan ketahanan pangan Kabupaten Solok. Target kinerja sasaran yang mengacu pada RPJMD tahun 2016-2021 yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan dan Pangan yang Mengacu pada RPJMD Tahun 2016-2021

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	4		5	6	7	8	9	10
1	Jumlah produksi perikanan (ton)	3.405,12	4.223	4.935	5.850	6.965	7.335	7.702
2	Ketersediaan pangan utama perkapita (kg/kap/thn)	435,43	541,59	554,13	567,14	580,64	594,47	608,65
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81,01	81,50	82,00	82,50	83,00	84,00	85,00

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan urusan perikanan dan ketahanan pangan untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan perikanan dan ketahanan pangan dalam kerangka mewujudkan visi dan misi Daerah Kabupaten Solok yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja pemerintahan daerah dalam RJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2020.

Sasaran, program dan tujuan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Solok.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Perikanan dan Pangan ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Perikanan dan Pangan.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Dinas perikanan dan Pangan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Solok.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Dinas Perikanan dan Pangan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan urusan Perikanan dan Ketahanan Pangan dan atau target kinerja sasaran Dinas Perikanan dan Pangan.

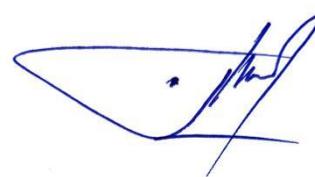
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan yang telah dijabarkan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Dinas Perikanan dan Pangan harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam Laporan Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan. Laporan

kinerja itu akan menjadi bukti pencapaian (*prove*) kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Perikanan dan Pangan dimasa yang akan datang.

Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Perikanan dan Pangan ini.

Koto Baru, Oktober 2018

KEPALA DINAS,



Drh. KENEDY HAMZAH

Pembina Utama Muda

NIP. 196507271992021002